

**KEMAMPUAN TENAGA PENDAMPING BADAN  
KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM Mendukung  
EFEKTIVITAS PROGRAM EKONOMI PERGULIRAN**

**ANNA NUUR CHULafa**



**DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS Ekologi MANUSIA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
2014**

## **PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kemampuan Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Mendukung Efektivitas Program Ekonomi Perguliran adalah benar karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2014

*Anna Nuur Chulafa*  
NIM. I34100118

## **ABSTRAK**

**ANNA NUUR CHULAFa** Kemampuan Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Mendukung Efektivitas Program Ekonomi Perguliran. Dibawah bimbingan **PUDJI MULJONO**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan masing-masing variabel yaitu kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat KSM), efektivitas program Ekonomi Perguliran Kelurahan Cipocok Jaya. Kemampuan pendamping sebagai fasilitator, motivator, narasumber dan pendidik sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan program. Selain itu dalam setiap proses pelaksanaan program diperlukan partisipasi anggota pada setiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dukungan dan kerjasama dari pihak pendamping maupun anggota sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas dan keberlanjutan program. Berdasarkan hasil penelitian ini pendamping memiliki hubungan yang sangat lemah dengan tingkat partisipasi anggota KSM, begitu pula dengan tingkat partisipasi anggota KSM dan efektivitas program. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya partisipasi aktif anggota dalam setiap tahapan program. Sehingga walaupun kinerja tenaga pendamping BKM memiliki kemampuan yang cukup baik, namun anggota belum dapat sepenuhnya terlibat secara aktif dalam program. Partisipasi anggota masih semu atau terdapat pada derajat partisipasi di tingkat *manipulation* dan *therapy*. Hal ini menjadikan program Ekonomi Perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya masih belum berjalan secara maksimal. Namun, walaupun demikian kemampuan tenaga pendamping BKM sebagai fasilitator memiliki korelasi yang kuat dengan efektivitas program. Hal ini menunjukkan manfaat program Ekonomi Perguliran sudah cukup dirasakan oleh anggota KSM berkat dampingan dan kerjasama dari pihak pendamping BKM.

Kata kunci: kemampuan pendamping, tingkat partisipasi, efektivitas program, ekonomi perguliran.

## **ABSTRACT**

**ANNA NUUR CHULAFa** The Capabilities of Badan Keswadayaan Masyarakat Companion to Support Revolving Economic Program Effectiveness. Supervised by **PUDJI MULJONO**

This research aims to analyze the correlation of Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) capabilities, the participation level of Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) members, and the effectiveness of the revolving economic program in Cipocok Jaya Village. The capabilities of companion as a facilitator, motivator, informant, and educator are very helpful in the process of

implementing the program. In addition, each process of the program implementation need the participation of members at every level of the program (planning, implementation, and evaluation). Companion and member's support and cooperation is required to achieve the effectiveness and sustainability of the program. The research shows that the capabilities of the BKM companion has a low correlation with the level of participation of KSM members, as well as the level of participation of KSM members and program effectiveness, caused by the low participation of active members in each phases of the program. Although the performance of the companion has a good capabilities, but members have not been able to fully involved actively in the program. The member participations still appearance at the participation level of manipulation and therapy. It makes the economic revolving program in the Cipocok Jaya Villagen still not running optimally. However, although the capabilities as a BKM companion has a strong correlation with the effectiveness of the program. It shows the benefits of the revolving economic program was already been felt by members of KSM caused by accompanying and cooperate of the BKM companion.

Keywords: companion capabilities, the level of participation, program effectiveness, economy revolving.

**KEMAMPUAN TENAGA PENDAMPING BADAN  
KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM Mendukung  
EFEKTIVITAS PROGRAM EKONOMI PERGULIRAN**

**ANNA NUUR CHULafa**

Skripsi  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat  
pada  
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

**DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2014**

Judul Skripsi : Kemampuan Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan  
Masyarakat dalam Mendukung Efektivitas Program Ekonomi  
Perguliran  
Nama : Anna Nuur Chulafa  
NIM : I34100118

Disetujui oleh

Dr Ir Pudji Muljono, MSi  
Dosen Pembimbing

Dr Ir Siti Amanah, MSc  
Ketua Departemen

Tanggal Lulus: \_\_\_\_\_

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “**Kemampuan Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Mendukung Efektivitas Program Ekonomi Perguliran**” ini dengan baik. Karya tulis ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa penulis sampaikan kepada Bapak Dr Ir Pudji Muljono, MSi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan, saran, dan masukan selama proses penulisan hingga penyelesaian proposal penelitian ini. Ucapan terimakasih juga tak lupa disampaikan kepada Bapak Yunus selaku koordinator BKM Sejahtera yang membantu dan mengarahkan penulis dalam pengambilan data di lapangan, serta anggota KSM yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis dalam penelitian ini. Terimakasih kepada keluarga di Banten yang telah menyediakan tempat tinggal untuk penulis selama penelitian dan membantu dalam penelitian ini (paman Sodri, bibi Utlah, Yanti, dan bibi Aan). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda Rakhmat dan Ibunda Ety Suryati, serta kedua adik tercinta Al Kindi Ramadhani dan Muhammad Afdhal Fikri, juga seluruh keluarga besar yang selalu berdoa, melimpahkan kasih sayangnya, dan memberi dukungan semangat dan material untuk penulis. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada semua teman-teman penulis di KPM angkatan 47, Sahabat-sahabat penulis di KPM yaitu Atrina DP, Aulia RA, Regina A, Fauziah Z, Kunti MW, teman satu bimbingan yang selalu berjuang bersama Fransisca Gita dan Rizki Ainiya, serta sahabat penulis sedari SMA yaitu Siti Hardinah A yang telah senantiasa memberi semangat dan menemani penulis dalam proses penulisan karya tulis ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, bantuan, dan kerjasamanya selama ini. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Juli 2014

*Anna Nuur Chulafa*

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	3
Tujuan Penelitian	4
Kegunaan Penelitian	5
PENDEKATAN TEORITIS	7
Tinjauan pustaka	7
PNPM Mandiri Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan	7
Program Ekonomi Perguliran	8
Efektivitas Program	9
Pendamping	10
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	11
Tingkat Partisipasi	12
Kerangka Pemikiran	15
Hipotesis Penelitian	16
Definisi Operasional	17
PENDEKATAN LAPANGAN	21
Metode Penelitian	21
Lokasi dan Waktu Penelitian	21
Teknik Pemilihan Responden dan Informan Penelitian	22
Teknik Pengumpulan Data	22
Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN	25
Kondisi Geografis Kelurahan Cipocok Jaya	25
Keadaan Ekonomi dan Sosial Kelurahan Cipocok Jaya	25
Keadaan Ekonomi	25
Keadaan Sosial	26
Profil Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan (BKM) Sejahtera	26
Karakteristik Responden Penelitian	29
Usia Responden Penelitian	29
Pendidikan Responden Penelitian	29
Jenis Pekerjaan Responden Penelitian	30
Jumlah Tanggungan Responden Penelitian	31



Tingkat Pendapatan Responden Penelitian	32
Jumlah Modal Usaha yang diterima Responden Penelitian	33
Kegunaan Modal Usaha bagi Responden Penelitian	34
<b>KEMAMPUAN TENAGA PENDAMPING BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) PNPM MANDIRI</b>	<b>37</b>
Kemampuan Memfasilitasi	37
Kemampuan Memotivasi	38
Kemampuan sebagai Narasumber	38
Kemampuan sebagai Pendidik	39
<b>EVEKTIVITAS PROGRAM EKONOMI PERGULIRAN</b>	<b>41</b>
Tingkat Keberhasilan Program Ekonomi Perguliran	41
Tingkat Kepuasan yang Diperoleh	42
Intensitas yang Dicapai	43
<b>TINGKAT PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)</b>	<b>45</b>
Perencanaan	46
Pelaksanaan	47
Evaluasi	49
<b>ANALISIS HUBUNGAN KEMAMPUAN TENAGA PENDAMPING BADAN KESWADAYAAN (BKM), TINGKAT PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT (KSM) DAN EFEKTIVITAS PROGRAM EKONOMI PERGULIRAN</b>	<b>51</b>
Hubungan Antara Kemampuan Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam Program Ekonomi Perguliran	51
Hubungan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Efektivitas Program Ekonomi Perguliran	54
Hubungan Kemampuan Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Efektivitas Program Ekonomi Perguliran	56
Ikhtisar	57
<b>PENUTUP</b>	<b>59</b>
Simpulan	59
Saran	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

1	Pengukuran tingkat partisipasi	20
2	Jadwal pelaksanaan penelitian periode Tahun 2014	21
3	Klasifikasi penduduk menurut rentang usia di Kelurahan Cipocok Jaya	25
4	Organisasi BKM Sejahtera Kelurahan Cipocok Jaya	27
5	Jumlah dan persentase kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam memfasilitasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	37
6	Jumlah dan persentase kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam memotivasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	38
7	Jumlah dan persentase kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai narasumber	39
8	Jumlah dan persentase tingkat keberhasilan program ekonomi perguliran	42
9	Jumlah dan persentase tingkat kepuasan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terhadap program ekonomi perguliran.	42
10	Jumlah dan persentase intensitas yang dicapai anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program ekonomi perguliran	43
11	Jumlah dan persentase tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam tahap perencanaan program ekonomi perguliran	47
12	Jumlah dan persentase tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pelaksanaan program ekonomi perguliran	48
13	Jumlah dan persentase tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam evaluasi program ekonomi perguliran	49
14	Korelasi <i>Rank Spearman</i> kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program ekonomi perguliran	52
15	Korelasi <i>Rank Spearman</i> tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan efektivitas program ekonomi perguliran	54
16	Korelasi <i>Rank Spearman</i> kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program ekonomi perguliran	56

## DAFTAR GAMBAR

1	Tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969)	12
2	Kerangka pemikiran	16
3	Persentase usia responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014	29

4	Persentase pendidikan terakhir responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014	30
5	Persentase jenis pekerjaan responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014	31
6	Persentase jumlah tanggungan responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014	33
7	Persentase tingkat pendapatan responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014	33
8	Persentase jumlah modal usaha yang diterima responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014	34
9	Persentase kegunaan modal usaha bagi responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1	Sketsa Kelurahan Cipocok Jaya	63
2	Daftar nama responden penelitian	64
3	Hasil olah data SPSS <i>Rank Spearman</i> 20.0	65
4	Dokumentasi penelitian	73



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mayoritas penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS (2013) pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28.07 juta orang. Jumlah tersebut berkurang sebesar 0.52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28.59 juta orang, walau terbilang terdapat penurunan jumlah penduduk miskin namun tingkat kesejahteraan di Indonesia belum tercapai secara merata bagi masyarakatnya. Seperti contoh kasus di Provinsi Banten, menurut data profil kemiskinan BPS (2013) di provinsi Banten jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 mencapai 656 243 orang, meningkat 7 989 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 648 254 orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2012 Maret 2013, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebesar 30 343 orang (30.4 persen) sementara penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang sebesar 22 354 orang (22.4 persen). Data statistik tersebut dapat menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan belum sepenuhnya tercapai, dari kenaikan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan. Salah satu faktor penyebab meningkatnya kemiskinan di daerah Banten adalah perekonomian Banten selama Triwulan I 2013 melambat dibandingkan dengan keadaan Triwulan III 2012.

Menyelesaikan permasalahan mengenai kemiskinan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan upaya melalui proses pengembangan masyarakat yaitu dengan melaksanakan program-program percepatan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya dalam pasal 27 ayat 2 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; serta Pasal 28 B ayat 2: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Hardjo 2008). Pada dasarnya program pembangunan yang berbasis pengembangan masyarakat perlu melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pelaksanaannya. Kegiatan pengembangan masyarakat akan tercapai apabila masyarakat dapat diberdayakan. Menurut Setiana (2001), pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ditekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri, dalam konsep pemberdayaan perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah. Mandiri tersebut mengandung arti tidak tergantung kepada uluran tangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengelola hidupnya sendiri dengan sumberdaya yang dimilikinya. Pada program pembangunan, masyarakat perlu memahami konsep pemberdayaan. Selama ini masyarakat cenderung

menginginkan bantuan instan dari pemerintah tanpa melalui proses pemberdayaan.

Salah satu program percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Menurut Pedoman Umum PNPM Mandiri (Bappenas 2007), PNPM merupakan gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan PNPM tersebar di seluruh pelosok Indonesia, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Seperti halnya contoh kasus di Provinsi Banten, partisipasi masyarakat di Provinsi Banten yang ikut dalam menerapkan PNPM Mandiri ke dalam program yang bernama Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu) yang terintegrasi dengan program PNPM Mandiri Pedesaan<sup>1</sup>. Wanto (2013) mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menggelontorkan anggaran 154 miliar rupiah dalam upaya pengentasan kemiskinan di 154 kecamatan di Banten pada Tahun 2013 ini. Total anggaran Banten tahun ini mencapai 1 026 triliun rupiah. Gubernur Banten menggunakan dana tersebut untuk program Gerbang Ratu, yang berupa kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten pada kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan yang diintegrasikan dengan program PNPM Mandiri. Dana tersebut digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan Provinsi Banten.

PNPM Mandiri membagi kegiatan program ke dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang ekonomi terdapat program ekonomi perguliran. Program tersebut memfokuskan kegiatan dalam mengembangkan ekonomi dengan pemberian pinjaman perguliran di masyarakat oleh pihak pemerintah (APBD) atau donator dari pihak luar. Kegiatan ini memiliki kelompok sasaran yaitu pengusaha mikro hingga menengah yang memiliki kendala dalam kekurangan modal untuk usaha. Program ini diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi usaha kecil. Diharapkan dalam pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan tepat sasaran bagi penerima manfaat yang membutuhkannya, agar dapat menjawab realita kemiskinan di Banten.

Setiap keberhasilan program pembangunan tidak terlepas dari pihak-pihak (*stakeholder*) yang terlibat dalam program, salah satu pihak tersebut adalah pendamping program pembangunan. Merujuk pada Petunjuk Teknis Oprasional PNPM Mandiri Pedesaan; Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten dan aparat berperan sebagai fasilitator dari luar masyarakat, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai pendamping. Pendamping local seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta seluruh pelaku PNPM Mandiri yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan. Sebagai pendamping masyarakat, pada waktu tertentu harus siap mundur dari perannya dan memandirikan para kader pemberdayaan. Pendamping program pembangunan sangat berpengaruh bagi kelangsungan proses kegiatan pemberdayaan. Hal ini menyebabkan pendamping perlu memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap urgensi program pembangunan tersebut. Adanya peran dari seorang pendamping merupakan

---

<sup>1</sup> PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Banten. [Internet]. [dikutip 12 Februari 2014]. Dapat diakses di <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=news&topic=Masyarakat&id=219>

seperangkat harapan yang ditentukan masyarakat terhadap para pemegang kedudukan. Posisi tersebut menjadikan peran dari seorang pendamping adalah bagian dari struktur sosial di masyarakat yang membentuk pola kekuasaan baru. Pada pelaksanaannya peran pendamping dapat dikategorikan sebagai pengendali dari suatu pelaksanaan program PNPM, maka dari itu keberhasilan program dapat diketahui dari kinerja pendamping dalam mengembangkan program.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Kelurahan Cipocok merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program ekonomi perguliran dari bidang ekonomi PNPM Mandiri. Berdasarkan pemaparan di atas, untuk mengetahui keberhasilan program ekonomi perguliran PNPM Mandiri dapat dilihat dari peran tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan pendamping program dalam mendukung proses pemberdayaan. Peran BKM dapat menjadikan program ekonomi perguliran berjalan secara berkelanjutan. Partisipasi aktif dan kemandirian menjadi suatu tolak ukur seorang pendamping berhasil memberdayakan masyarakat. **Oleh karena itu, penting untuk diteliti bagaimana hubungan antara kemampuan pendamping dalam mendukung efektivitas program ekonomi perguliran.**

### Rumusan Masalah

Proses pemberdayaan dalam setiap program PNPM Mandiri tentunya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, hal ini dikarenakan sasaran utama program tersebut adalah untuk mengentaskan fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Masyarakat tentunya menjadi pelaku utama atau sebagai subyek dari kegiatan pemberdayaan ini. Menjadikan masyarakat mau berpartisipasi dalam program bukanlah perkara mudah, butuh pendekatan dan perlakuan yang berbeda oleh tim pendamping dalam menghadapi karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Tingkatan partisipasi di suatu masyarakat juga beragam, terdapat beragam teori yang meneliti hal tersebut khususnya pada teori delapan tangga partisipasi menurut Arnstein (1969) yaitu, *manipulating* (manipulasi), *therapy* (terapi), *informing* (menginformasikan), *consultation* (konsultasi), *placation*, *partnership* (kemitraan), serta *delegated power* (kekuasaan yang didelegasikan). Delapan tangga partisipasi tersebut dapat menunjukkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program, dengan mengetahui hal tersebut dibutuhkan tenaga pendamping yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. **Maka dari itu menjadi penting untuk diteliti bagaimana hubungan kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terhadap tingkat partisipasi anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) sebagai penerima manfaat program ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya.**

PNPM Mandiri mengandalkan program ekonomi perguliran yang berupa kegiatan penumbuhan perilaku kepedulian dalam pemberian pinjaman perguliran di masyarakat oleh pihak pemerintah atau donator dari pihak luar. Harapan dari program tersebut adalah partisipasi aktif penerima manfaat program dalam memanfaatkan peluang usaha bagi pengusaha mikro/ sedang yang kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya. Kegiatan ini diharapkan dapat berjalan

dengan efektif dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Kelurahan Cipocok Jaya. Efektivitas program dapat dilihat dari jumlah hasil yang dikeluarkan dari kegiatan ekonomi perguliran, hasil tersebut dapat berupa meningkatnya keberhasilan usaha mikro ataupun terciptanya lapangan usaha baru bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usaha. Tingkat kepuasan dari masyarakat akan program dengan partisipasi aktif masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut dapat diketahui sampai sejauh mana kepuasan masyarakat dengan kegiatan ekonomi perguliran ini. Pengembangan perekonomian dalam kegiatan ini dapat berupa produk kreatif yang dihasilkan dari masyarakat, sehingga nilai dari suatu produk kreatif tersebut dapat dijadikan sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain hasil yang berupa kuantitas, kegiatan ini juga dapat dilihat keberhasilannya melalui intensitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam program, sehingga terciptanya *sense of belonging* (rasa saling memiliki) terhadap program tersebut. **Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana hubungan tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penerima manfaat program dengan efektivitas program ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya.**

PNPM Mandiri dalam kegiatan di berbagai sektoral dalam pelaksanaannya berbasis masyarakat, namun pada kenyataannya ditemukan kualitas pemberdayaan yang beragam di setiap daerah baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kapasitas tenaga pendamping yang kurang memadai sehingga terbatas sebagai tim pendamping teknis pelaksanaan PNPM Mandiri. Perlunya pendamping untuk memfasilitasi segala kebutuhan program dalam mengkoordinasi kegiatan. Pendamping juga perlu memiliki kemampuan memotivasi penerima manfaat untuk mendapatkan kepercayaan, sehingga penerima manfaat mau bekerjasama dalam melaksanakan program ini. Pelaksanaan PNPM Mandiri tidak terlepas dari campur tangan pihak lain dalam memonitoring pelaksanaan program, maka pendamping dituntut untuk menjadi narasumber untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun pihak luar. Selain itu, pendamping perlu memiliki kemampuan sebagai pendidik yang mampu memberikan contoh positif kepada masyarakat serta mumpuni dalam memberikan pelatihan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi pada masyarakat. **Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian bagaimana hubungan antara kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan efektivitas program ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya.**

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terhadap tingkat partisipasi anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) sebagai penerima manfaat program ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya.
2. Menganalisis hubungan tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penerima manfaat program dengan efektivitas program ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya.



3. Menganalisis hubungan antara kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pendamping program dengan efektivitas program ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya.

### **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait untuk perencanaan program selanjutnya, sehingga dengan adanya penelitian ini, pelaksanaan program pembangunan khususnya PNPM Mandiri selanjutnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah:

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Cipocok Jaya, Serang, Banten  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja tim pendamping dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat Kelurahan Cipocok Jaya agar perencanaan kedepannya dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan dapat member masukan bagi pemerintahan yang merupakan pengambil kebijakan dalam memonitoring kinerja pendamping bagi kelangsungan program PNPM Mandiri. Hal tersebut ditunjukkan kepada baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Diharapkan pihak pemerintah dapat bersinergi dengan pihak-pihak lain dalam membangun hubungan baik dengan pihak swasta maupun masyarakat. Serta diharapkan pemerintah juga dapat menyusun strategi untuk perencanaan program PNPM Mandiri selanjutnya.
3. Bagi Tim Pendamping PNPM Mandiri  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tim pendamping PNPM Mandiri, baik tim pendamping internal maupun eksternal sebagai bahan evaluasi atas kinerja tim pendamping selama membina masyarakat, serta pembelajaran untuk menyusun perencanaan yang lebih baik lagi dalam PNPM Mandiri ataupun program pembangunan lainnya.
4. Bagi peneliti dan kalangan akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi maupun sumber pustaka dan dapat menjadi proses pembelajaran bagi peneliti dan akademisi lain dalam mengembangkan program PNPM Mandiri dengan melihat aspek peran pendamping didalamnya



# **PENDEKATAN TEORITIS**

## **Tinjauan pustaka**

### **PNPM Mandiri Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan**

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program-program pembanguana yang berbasis kepada pengembangan masyarakat melalui konsep pemberdayaan. Salah satu program unggulan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersebut ialah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun 2007 PNPM Mandiri dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Mulai Tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen sector (Bappenas 2007).

Pedoman Umum PNPM Mandiri (Bappenas 2007) menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan umumnya dilaksanakan oleh pemerintah sebagai suatu program. Program pembangunan menjadi suatu kegiatan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada prinsipnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana perguliran dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar juga diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana perguliran ini, Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target-target, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

Pengelolaan PNPM Mandiri menurut Pedoman umum PNPM Mandiri (Bappenas 2007) terdiri dari persiapan, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi, pelaporan dan sosialisasi. Pengelolaan tersebut melibatkan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri. Seperti dalam penelitian Mubarak (2013) yang menyebutkan bahwa untuk mengembangkan kapasitas masyarakat pada kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan dilakukan rangkaian kegiatan sosialisasi di tingkat masyarakat yang terdiri dari kegiatan sosialisasi awal, rembug kesiapan masyarakat, dan sosialisasi lanjutan sebagai tahapan persiapan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan

kegiatan PNPM yang akan dilaksanakan di desanya. Setelah persiapan yang matang, fasilitator bersama anggota masyarakat terlibat dalam perencanaan partisipatif. Menurut Rejeki (1998) dalam Setiana (2001), perencanaan merupakan suatu proses kegiatan persiapan sistematis untuk penyusunan kebijakan yang konsisten menuju tercapainya suatu tujuan tertentu. Lebih luas perencanaan dalam suatu program didefinisikan sebagai suatu prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-keadaan yang belum memuaskan) dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan penerimaan manfaat yang ingin dicapai (Venugopal 1957 dalam Mardikanto 2010). Perencanaan program pembangunan perlu melibatkan partisipasi masyarakat, karena program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya perencanaan program dalam penelitian Saptono (2013) berupa penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronarkis) yang disusun sendiri oleh masyarakat. Perencanaan tersebut berisi program kegiatan untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan masalah, hambatan, potensi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan Fitalia (2012) dalam PNPM Mandiri Pedesaan, pengendalian adalah kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian merupakan bagian dari tahapan realisasi PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuan pengendalian PNPM Mandiri Pedesaan adalah: Menjaga setiap proses PNPM Mandiri Pedesaan selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan; menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar; mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria; mengendalikan pemanfaatan dana PNPM Mandiri Pedesaan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan; mengendalikan agar setiap pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai fungsinya masing-masing.

### **Program Ekonomi Perguliran**

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada umumnya ditujukan bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah disepakati masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Program ini disebut dengan ekonomi perguliran, yang merupakan kegiatan penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin (Bappenas 2007). Program ini ditujukan pada masyarakat yang memiliki kendala usaha yang tidak berkembang karena kekurangan modal usaha. Kegiatan ini dilakukan dengan menumbuhkan perilaku kepedulian kepada masyarakat dalam pemberian pinjaman bergulir di masyarakat oleh pihak pemerintah atau donator dari pihak luar. Program ekonomi perguliran diharapkan mampu membantu pengusaha mikro ataupun pengusaha menengah yang kekurangan modal usaha untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan. Kebutuhan yang diharapkan dapat terpenuhi dengan adanya program ini adalah meningkatnya skala usaha melalui penambahan modal dari hasil pinjaman serta

peningkatan skala usaha melalui penambahan modal usaha. Sasaran dari program ini merupakan pengusaha mikro/średang serta kelompok industri kecil/rumahan.

### **Efektivitas Program**

Efektivitas berasal dari kata efektif /efek·tif/ /éféktif/ yang didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan adanya efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berhasil guna (usaha, tindakan). Maka efektivitas dapat diartikan sebagai suatu akibat atau pengaruh yang berhasil guna disebabkan oleh suatu tindakan atau usaha dalam mencapai suatu hal, sedangkan efektivitas program merupakan suatu hasil guna dari suatu pengaruh pelaksanaan suatu program untuk mencapai tujuan program. Menurut Riza dan Rusli (2012), pada penelitiannya dalam menentukan efektivitas program, mereka menggunakan indikator efektivitas program sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey, yaitu: jumlah hasil yang dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif, serta intensitas yang akan dicapai.

#### 1. Jumlah hasil yang dikeluarkan

Hasil yang dimaksudkan berupa kuantitas atau bentuk fisik dari suatu program atau kegiatan. Hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jumlah hasil yang dikeluarkan ini dapat diukur dengan perbandingan usaha dan hasil serta dengan melihat tingkat keberhasilan program.

#### 2. Tingkat Kepuasan yang Diperoleh

Karakteristik kepuasan dapat ditentukan dari keterbukaan berkomunikasi antara pendamping dengan masyarakat ataupun komunikasi dengan pihak lain, tingkat kerajinan juga menjadi ukuran yang mempengaruhi, berkurangnya keluhan dari masyarakat, kedisiplinan, dan lain-lain. Ukuran untuk efektivitas ini dapat bersifat kuantitatif (jumlah atau banyaknya) dan juga bersifat kualitatif (mutu). Hal tersebut dapat terlihat dari hubungan komunikasi yang dijalin antar *stakeholder* dan tingkat keluhan masyarakat yang semakin berkurang.

#### 3. Produk Kreatif

Terciptanya suatu hubungan pada kondisi yang kondusif dengan jenis usaha yang ditekuni, hubungan tersebut dapat menumbuhkan kreativitas, cara kerja, dan kemampuan. Produk kreatif dapat dilihat dari kreativitas masyarakat dalam memproduksi produk serta kinerja kelompok dalam menghasilkan produk tersebut.

#### 4. Intensitas yang akan dicapai

Intensitas dalam mentaati suatu aturan yang ada dalam program, dimana masyarakat memiliki *sense of belonging* (rasa saling memiliki) yang tinggi. Intensitas yang akan dicapai dapat diukur dari penggunaan dana yang sesuai dengan ketentuan serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Ukuran dari pada efektivitas memerlukan suatu tingkat kepuasan dan adanya tingkat kekohesivitasan yang memiliki intensitas tinggi dari masyarakat dalam mengikuti suatu program. Ukuran dari pada efektivitas tersebut adalah hubungan masyarakat yang mempunyai rasa saling memiliki (*sense of belonging*) dengan tingkatan yang tinggi dalam keterlibatan program. Efektivitas program PNPM dapat diketahui dari proses monitoring dan evaluasi, menurut Suharto

(2005) Monitoring Evaluasi (MONEV) merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi program sosial yang diberikan dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut Suharto menjelaskan penggunaan indikator sosial dalam pengukuran keefektifan suatu program dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu: indikator kinerja, untuk mengidentifikasi keadaan masukan dan proses pelayanan sosial oleh *stakeholder* terkait. Selanjutnya indikator keluaran, menunjukkan hasil langsung (*output*) maupun tidak langsung atau dampak (*outcome*) dari suatu kegiatan pelayanan.

### **Pendamping**

Setiap program pembangunan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu terlibat dalam proses pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Menurut Mardikanto (2010) pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses tersebut didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Adanya peran pendampingan menjadi indikator keberhasilan suatu program pemberdayaan, sampai sejauh mana peran pendamping dapat membuat masyarakat menjadi berdaya dan mandiri. Seperti halnya yang dikemukakan Suharto (2005) pendampingan sosial merupakan suatu strategi untuk menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial di mana komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Suharto (2005) juga mengungkapkan bahwa pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi, yakni : pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*). Pada penelitian Hadi *et al.* (2013) dijelaskan bahwa keberhasilan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada pada program PNPM Mandiri Pedesaan tidak lepas dari peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD dituntut mempunyai kemampuan teknis dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa peran KPMD adalah memfasilitasi atau memandu seluruh anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan PNPM-Mandiri Pedesaan di desa secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan yang paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Kegiatan pendampingan merupakan suatu strategi untuk meningkatkan efektivitas suatu program, namun bukan berarti kehadiran peran pendamping yang aktif menjadi acuan berhasilnya suatu program, partisipasi masyarakat justru berperan lebih besar dalam keberhasilan suatu program. Peran pendampingan diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam proses pemberdayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Mardikanto (2010), tim pendamping merupakan faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan kurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam

Panduan Operasional PNPM Mandiri menjelaskan mengenai fungsi dari pendamping, yaitu sebagai narasumber, sebagai guru, dan sebagai mediator. Peran pendamping dari berbagai pernyataan diatas dapat ditarik garis besar, bahwa peran pendamping sebagai:

1. Fasilitator

Pendamping masyarakat yang berperan dalam memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Panduan oprasional PNPM Mandiri menjelaskan bahwa menjadi seorang fasilitator/pendamping perlu dibekali beberapa kemampuan di antaranya, kepemimpinan, konseptual, komunikasi, menjadi pendengar yang aktif, bertanya efektif dan terarah, kemampuan dalam pengembangan masyarakat, dalam pelaksanaannya, proses dalam memfasilitasi masyarakat perlu melalui dua tahap yaitu, tahap identifikasi dan penjajakan awal dimana tahap tersebut melakukan kegiatan penjelasan umum dan pembentukan tim pelaku. Tahap kedua dimulai dari tahap sosialisasi dan penyebarluasan informasi hingga pada pelaksanaan pendampingan.

2. Motivator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) motivator didefinisikan sebagai seseorang (perangsang) yg menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak: yang mampu menggerakkan masyarakat; dan seorang petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan. Pendamping program berperan untuk mempersuasi masyarakat dengan cara memotivasi untuk ikut terlibat dalam program.

3. Narasumber

Definisi narasumber menurut KBBI adalah seseorang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi; informan. Pendamping merupakan sumber informasi terkait program, diharapkan dengan adanya pendamping segala informasi dapat dikomunikasikan dengan masyarakat maupun pihak luar.

4. Pendidik

Pendidik dimaksudkan pendamping sebagai sarana untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan, dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai program. Pendamping juga berperan dalam mendidik masyarakat agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku dengan kedisiplinan.

### **Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan tim pendamping lokal yang dibentuk atas dasar swadaya dari masyarakat. BKM sebagai pendamping lokal memiliki kriteria, yaitu (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan) :

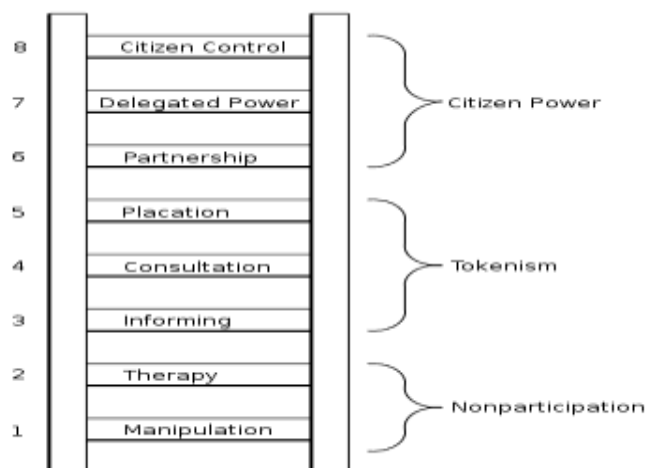
1. Warga kecamatan setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga masyarakat.
2. Minimal berpendidikan setingkat SMU atau sederajat.
3. Diutamakan mantan fasilitator pemberdayaan masyarakat.
4. Bukan aparat pemerintah desa atau suami/istrinya.
5. Mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugasnya.
6. Diterima semua kalangan masyarakat serta tidak memihak kepada kelompok tertentu saja.

### 7. Peduli terhadap pembangunan di desa dan antar desa.

Kehadiran BKM sebagai pendamping lokal di masyarakat merupakan strategi untuk memperlancar pelaksanaan program, selain itu masyarakat dapat diberdayakan untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Harapan dari hadirnya BKM di tengah masyarakat agar mampu menumbuh kembangkan kapasitas internal Kelembagaan BKM menuju lembaga yang Mandiri dan membangun kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak atau lembaga yang memiliki kesamaan prinsip untuk mencapai tujuan bersama yaitu mengentaskan kemiskinan.

### Tingkat Partisipasi

Program pembangunan perlu memfokuskan tujuan untuk mengembangkan masyarakat. Pencapaian keberhasilan suatu program pembangunan memerlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan program tersebut. Menurut teori yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari seberapa jauh seseorang terlibat dalam suatu kegiatan, dengan menggunakan delapan tingkatan partisipasi yaitu, *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, dan citizen control*.



Gambar 1 Tingkat Partisipasi menurut Arnstein (1969)

#### a) *Manipulating* (Manipulasi)

Partisipasi pada tingkatan ini merupakan tingkat terendah yang menandakan adanya distorsi partisipasi oleh pemegang kekuasaan. Partisipasi ini hanya bentuk “ilusi” ketika elit sosial menjadikan partisipasi hanya untuk pemenuhan target semata. Dengan kata lain partisipasi pada tingkatan ini adalah semu dan di manipulasi oleh pemegang kekuasaan.

#### b) *Therapy* (Terapi)

Tingkat partisipasi terendah kedua adalah *therapy* karena keduanya merupakan partisipasi yang semu. Pada tingkatan ini pemegang kekuasaan seolah memandang ketidakberdayaan masyarakat sebuah kedok belaka untuk mengikutsertakan masyarakat dalam program. Hal ini membentuk



“partisipasi” melibatkan masyarakat dalam aktivitas yang luas, namun fokus utama dari kebutuhan masyarakat akan keterlibatannya dalam suatu program tidak tercapai.

c) *Informing* (Menginformasikan)

Partisipasi masyarakat dalam tingkatan ini ditempatkan pada aliran satu arah. Informasi hanya berjalan satu arah dari pemegang kekuasaan kepada masyarakat dengan tidak terdapat umpan balik dan masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Sehingga masyarakat tidak mampu mempengaruhi program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

d) *Consultation* (Konsultasi)

Masyarakat diberi kesempatan untuk memberi pendapat, tetapi jika konsultasi mereka tidak dikombinasikan dengan moda partisipasi, pada tahapan ini masih terbilang “palsu” karena tidak memberikan jaminan bahwa pengaduan dan ide-ide masyarakat akan diperhitungkan oleh pemegang keputusan.

e) *Placation*

Tahapan ini masyarakat mulai memiliki pengaruh meskipun tokenisme masih jelas terjadi. Masyarakat mulai dilibatkan dalam memberikan masukan ataupun mengusulkan rencana kepada pemegang kekuasaan, namun kewenangan untuk menentukannya tetap pada pemegang kekuasaan.

f) *Partnership* (Kemitraan)

Masyarakat memiliki kekuasaan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat. Terjadi kesepakatan dalam bertanggung jawab terhadap program, mulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan. Terdapat aturan dasar yang telah ditetapkan dan disepakati bersama melalui melalui bentuk “memberi dan menerima”, sehingga kedua belah pihak tidak mengalami perubahan sepihak.

g) *Delegated Power* (Kekuasaan yang didelegasikan)

Pada tahapan ini terjadi negosiasi antar masyarakat dengan pemegang kekuasaan yang mengakibatkan masyarakat mencapai pengambilan keputusan yang dominan dengan otoritas atas suatu perencanaan program tertentu. Kekuasaan didelegasikan kepada kelompok yang sejajar dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan keputusan dan juga memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut.

h) *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Tingkat partisipasi tertinggi adalah kontrol dari masyarakat untuk mengendalikan pelaksanaan program. Masyarakat memiliki tingkat kekuatan untuk mengatur program bahkan institusi, serta bertanggung jawab penuh atas kebijakan dan aspek manajerial. Selain itu masyarakat juga berhak melakukan negosiasi dengan kondisi dimana “orang luar” tidak dapat dengan mudah mengubah keadaan masyarakat.

Selain teori Arnstein di atas, terdapat beberapa teori tingkat partisipasi lainnya seperti menurut Wilcox (1988) dalam Mardikanto (2010) yang mengemukakan lima tingkatan atau tahap partisipasi, yaitu. Memberikan informasi (*information*), konsultasi (*Consultation*), pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), bertindak bersama (*acting together*), hingga tahap memberikan dukungan (*supporting independent community interest*), tingkat partisipasi tersebut menentukan keberhasilan suatu program pembangunan. Suatu

program dikatakan berhasil apabila anggota masyarakat yang berpartisipasi telah mencapai tahap memberikan dukungan. Menurut Hadi *et al.* (2013) dalam penelitiannya menjelaskan partisipasi masyarakat dalam program PNPM MP adalah tingkat keterlibatan masyarakat rumah tangga miskin dalam setiap tahapan kegiatan PNPM MP. Tingkat partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari lima indikator yaitu tingkat partisipasi dalam perencanaan, tingkat partisipasi dalam memberikan swadaya, tingkat partisipasi dalam pelaksanaan, tingkat partisipasi dalam memonitoring dan evaluasi, dan tingkat partisipasi menikmati hasil.

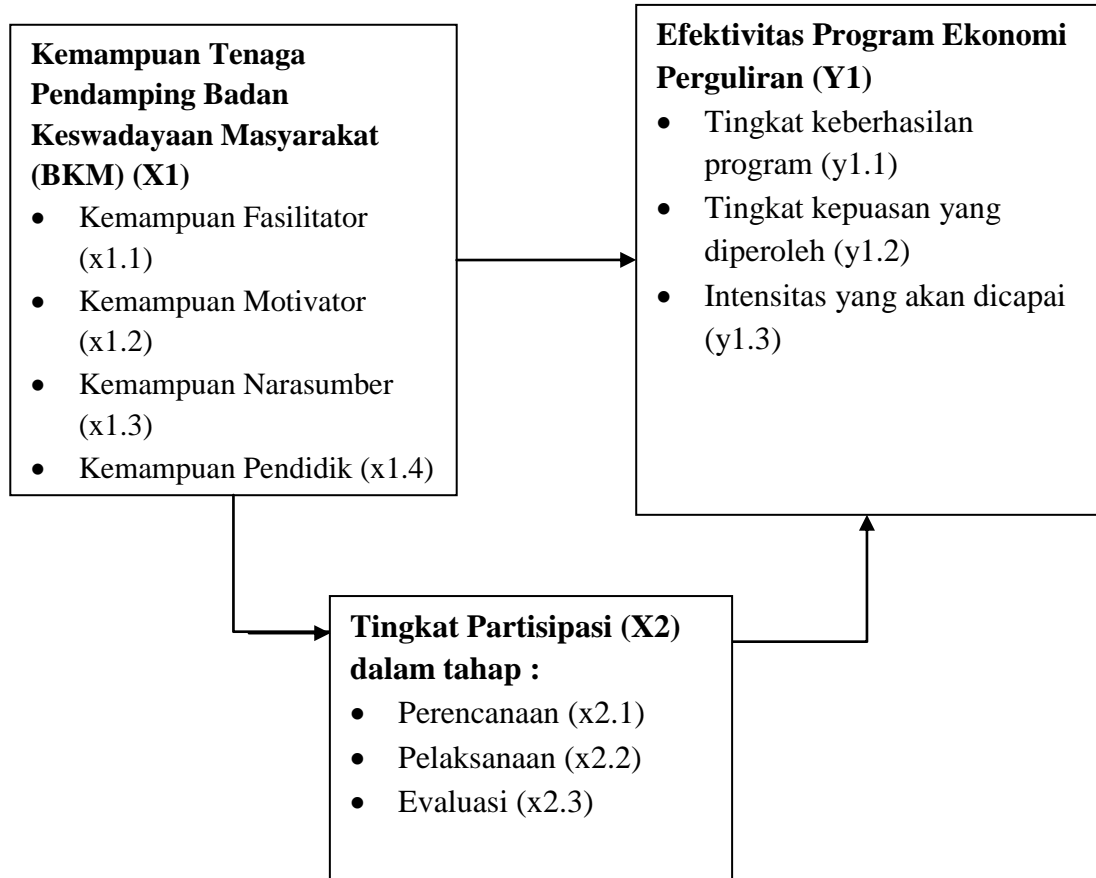
Partisipasi anggota masyarakat menjadi sangat penting untuk kelangsungan dan keberlanjutan PNPM Mandiri. Program yang berkelanjutan memerlukan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya yang terlibat dalam pemberdayaan. Pemberdayaan sejatinya memerlukan keikutsertaan masyarakat sebagai sumberdaya untuk pembangunan, menurut Sumodiningrat (2007) pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan, sedangkan menurut Setiana (2001) pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ditekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Konsep pemberdayaan dalam penelitian Risna dan Rusli (2013) menyatakan bahwa seluruh hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) yang telah dilaksanakan oleh masyarakat wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan sektoral yang dilaksanakan harus memiliki rencana yang dapat menjamin pelestarian kegiatan tersebut. Segala keputusan yang menyangkut pengembangan atau pelestarian kegiatan harus disepakati dalam musyawarah desa.

## **Kerangka Pemikiran**

Kehadiran tenaga pendamping BKM di masyarakat merupakan suatu upaya agar program PNPM Mandiri khususnya program ekonomi perguliran dapat berjalan dengan baik serta untuk meminimalkan kendala dalam pelaksanaan program. Program ekonomi perguliran merupakan program pengentasan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini tenaga pendamping menjadi bagian dalam struktur sosial di masyarakat yang kedudukannya berpengaruh dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut.

Penelitian ini ingin melihat hubungan kemampuan tenaga pendamping yang tergabung kedalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang memiliki kemampuan memfasilitasi, memotivasi, sebagai narasumber, dan sebagai pendidik, dengan tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein (1969) yang dihubungkan kedalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Hubungan yang dimaksudkan berupa pendamping sebagai penggerak bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam program, hal tersebut menjadikan peran dari tenaga pendamping BKM sangat berpengaruh bagi tingkat partisipasi masyarakat dalam program. Peran pendamping juga dapat berkorelasi dengan efektivitas program ekonomi perguliran, dalam penelitian ini melihat keterkaitan peran pendamping dengan efektivitas program PNPM Mandiri khususnya pada kegiatan ekonomi perguliran. Efektivitas program ekonomi perguliran dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya, tingkat keberhasilan program, tingkat kepuasan yang diperoleh, serta intensitas yang dicapai anggota KSM sebagai penerima manfaat program ekonomi perguliran.

Efektivitas suatu program juga dapat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi, dalam hal ini keterkaitan antara partisipasi dengan efektivitas program sangat erat karena partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor keberhasilan suatu program. Semakin berpartisipasi anggota KSM dalam setiap tahapan kegiatan program ekonomi perguliran, maka dapat meningkatkan efektivitas program tersebut. Berikut ini adalah kerangka pemikiran mengenai hubungan-hubungan antar variabel yang akan menjadi dasar penelitian ini :



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Keterangan :  $\longrightarrow$  = Hubungan

### Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan antara kemampuan tenaga pendamping BKM dalam memfasilitasi, memotivasi, sebagai narasumber atau sebagai pendidik dengan tingkat partisipasi anggota KSM dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program ekonomi perguliran.
2. Diduga terdapat hubungan antara tingkat partisipasi anggota KSM dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan tingkat keberhasilan program, tingkat kepuasan yang diperoleh dan intensitas yang akan dicapai anggota KSM dalam mendukung efektivitas program ekonomi perguliran.
3. Diduga terdapat hubungan antara kemampuan tenaga pendamping BKM dalam memfasilitasi, memotivasi, sebagai narasumber atau sebagai pendidik dengan tingkat keberhasilan program, tingkat kepuasan yang diperoleh dan intensitas yang akan dicapai anggota KSM dalam mendukung efektivitas program ekonomi perguliran.

## Definisi Operasional

Definisi operasional untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

### 1) Efektivitas Program Ekonomi Perguliran

Keadaan dimana program PNPM Mandiri khususnya dalam pengembangan kegiatan ekonomi perguliran berjalan dengan efektif. Efektivitas tersebut dapat diketahui dengan menggunakan indikator efektivitas yaitu, tingkat keberhasilan program ekonomi perguliran, tingkat kepuasan yang diperoleh serta intensitas yang akan dicapai.

#### a) Tingkat Keberhasilan Program Ekonomi Perguliran

Keberhasilan program ekonomi perguliran dapat diukur dari kualitas output program yang didapat dari penerima manfaat program yaitu anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pengukuran menggunakan pilihan jawaban “Setuju”, “Kurang Setuju” dan “tidak setuju”, yang masing-masing bernilai “3”, “2” dan “1”.

- i. Rendah (jika total nilai 7-11)
- ii. Sedang (jika total nilai 12-16)
- iii. Tinggi (jika total nilai 17-21)

#### b) Tingkat kepuasan yang diperoleh

Tingkat kepuasan dapat dilihat dari keterbukaan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, sikap positif yang ditunjukkan masyarakat terhadap program ekonomi perguliran, serta berkurangnya keluhan mengenai permasalahan ekonomi.

Pengukuran yang digunakan menggunakan pilihan jawaban “Setuju”, “Kurang Setuju” dan “Tidak Setuju”, yang masing-masing bernilai “3”, “2” dan “1”.

- i. Rendah (jika total nilai 5-7)
- ii. Sedang (jika total nilai 8-11)
- iii. Tinggi (jika total nilai 12-15)

#### c) Intensitas yang akan dicapai

Pengaruh program yang mampu membuat masyarakat mempunyai rasa saling memiliki yang tinggi. Intensitas tersebut dapat dicapai dengan kesaling terbuka antara pihak pendamping dengan masyarakat mengenai pelaksanaan program, serta kepatuhan terhadap aturan untuk mencapai tujuan bersama.

Pengukuran yang digunakan menggunakan pilihan jawaban “Setuju”, “Kurang Setuju” dan “Tidak Setuju”, yang masing-masing bernilai “3”, “2” dan “1”.

- i. Rendah (jika total nilai 6-9)
- ii. Sedang (jika total nilai 10-13)
- iii. Tinggi (jika total nilai 14-18)

### 2) Kemampuan tenaga pendamping BKM

Tenaga pendamping merupakan seorang individu ataupun sekelompok orang dianggap mampu menjadi perwakilan masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan, serta tanggung jawab yang tinggi dalam menjadi

pendamping masyarakat yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Seorang pendamping dianggap memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan. Selain itu pendamping juga dituntut untuk cakap berkomunikasi dan mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program. Maka dari itu, kemampuan tenaga pendamping dapat dikategorikan yaitu kemampuan dalam memfasilitasi, memotivasi, dan kemampuan sebagai narasumber serta sebagai pendidik. Terdapat pilihan jawaban dari masing-masing pertanyaan “Ya” dan “Tidak” masing-masing bernilai “1” dan “2”.

a) Kemampuan memfasilitasi

Pendamping masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi anggota KSM dalam setiap kegiatan program dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pendamping mampu melayani kebutuhan masyarakat, menampung segala aspirasi anggota KSM dan selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program.

- i. Rendah (jika total skor antara 5-6)
- ii. Sedang (jika total skor antara 7-8)
- iii. Tinggi (jika total skor antara 9-10)

b) Kemampuan memotivasi

Pendamping mampu memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kebersamaan dalam membangun hubungan sosial.

- i. Rendah (jika total skor antara 5-6)
- ii. Sedang (jika total skor antara 7-8)
- iii. Tinggi (jika total skor antara 9-10)

c) Kemampuan sebagai narasumber

Pendamping memiliki kemampuan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap program, sehingga pendamping harus mampu menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh pihak terkait program.

- i. Rendah (jika total skor antara 5-6)
- ii. Sedang (jika total skor antara 7-8)
- iii. Tinggi (jika total skor antara 9-10)

d) Kemampuan sebagai pendidik

Pendamping memiliki fungsi sebagai seorang pendidik yang memiliki kemampuan untuk mendidik anggota KSM dengan memberikan kebebasan kepada anggota KSM untuk mengutarakan pendapat, kritikan hingga saran terhadap opini yang ada serta membebaskan pemikiran masyarakat untuk berfikir kreatif dalam memecahkan permasalahan yang ada.

- i. Rendah (jika total skor antara 5-6)
- ii. Sedang (jika total skor antara 7-8)
- iii. Tinggi (jika total skor antara 9-10)

3) Tingkat Partisipasi

Keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan PNPM Mandiri khususnya pada program ekonomi perguliran. Partisipasi masyarakat dapat

diukur menggunakan tingkatan partisipasi menurut Arnstein (1969), dalam teorinya Arnstein memiliki tahapan untuk mengkategorikan tingkatan sejauh mana seseorang dikatakan berpartisipasi. Hal tersebut terbagi kedalam delapan tangga partisipasi yaitu, *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power*, dan *citizen control*. Kedelapan tangga tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu non-partisipasi (*manipulation* dan *therapy*), tokenisme (*informing, consultation, dan placation*), serta kontrol masyarakat (*citizen power*) (*partnership, delegated power, dan citizen control*).

1) *Manipulating* (Manipulasi)

Partisipasi pada tingkatan ini berupa, keikutsertaan anggota KSM disebabkan oleh alasan diluar pogram.

2) *Therapy* (Terapi)

Kehadiran anggota KSM hanya sebatas memenuhi undangan rapat dari pendamping BKM ataupun hanya memenuhi kuota rapat semata.

3) *Informing* (Menginformasikan)

Partisipasi anggota KSM dalam tingkatan ini hanya satu arah dengan pendamping, anggota hanya dilibatkan dalam penyampaian informasi, namun tidak dapat bebas memberikan pendapat.

4) *Consultation* (Konsultasi)

Anggota KSM mulai diberi kesempatan untuk memberi pendapat, tetapi tidak memberikan jaminan bahwa pengaduan dan ide-ide anggota akan diperhitungkan oleh tim pendamping BKM.

5) *Placation*

Tahapan ini anggota KSM mulai memiliki pengaruh, anggota mulai dilibatkan dalam memberikan masukan ataupun mengusulkan rencana kepada tim BKM, namun kewenangan untuk menentukannya tetap pada tim BKM.

6) *Partnership* (Kemitraan)

Anggota KSM memiliki melakukan negosiasi dengan tim pendamping BKM untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang disepakati bersama terhadap program ekonomi perguliran.

7) *Delegated Power* (Kekuasaan yang didelegasikan)

Anggota KSM memiliki kekuasaan penuh terhadap program ekonomi perguliran yang mengakibatkan anggota mencapai pengambilan keputusan yang dominan.

8) *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Anggota KSM mengendalikan pelaksanaan program sepenuhnya dan memiliki kekuasaan untuk mengatur program ekonomi perguliran sesuai kesepakatan anggota.

Kedelapan tangga tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu

- a) non-partisipasi yaitu *manipulation* dan *therapy*, merupakan tingkat dimana anggota belum berpartisipasi seutuhnya.
- b) tokenisme yaitu *informing, consultation, dan placation*, merupakan derajat partisipasi dimana anggota mulai terlibat dan berperan aktif dalam program.

- c) kontrol masyarakat (*citizen power*) yaitu *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*, merupakan tingkat partisipasi dimana anggota mencapai tingkatan partisipasi tertinggi. Hal ini menunjukkan anggota memiliki kedudukan untuk mengontrol program.

Tingkat Partisipasi ini akan dilihat dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat.

- a) Perencanaan yaitu kegiatan sebelum dimulainya suatu program untuk membuat rancangan kegiatan. Pada proses ini dapat dilihat keterlibatan anggota KSM melalui kehadiran di dalam perencanaan program.
- b) Pelaksanaan yaitu proses berjalannya program ekonomi perguliran, yaitu keikutsertaan anggota KSM dalam pencairan dana pinjaman untuk modal usaha hingga pada proses pengembalian.
- c) Evaluasi yaitu kegiatan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program ekonomi perguliran. Pada proses ini dapat dilihat, apakah anggota KSM dilibatkan dalam proses evaluasi.

Pengukuran tingkat partisipasi ini berupa pernyataan yang secara berkala diberikan kepada responden. Apabila terdapat jawaban “tidak” dari responden pada lanjutan pernyataan tersebut, maka responden tidak perlu melanjutkan pada pernyataan selanjutnya. Ketiga kategori dari delapan pernyataan ini masing-masing diberi skor 1-8. Skor minimal setiap individu  $1 \times 3 = 3$  dan skor maksimalnya adalah  $8 \times 3 = 24$  sehingga :

i. Non-partisipasi (Rendah)

- 1) *Manipulating* (Manipulasi) : Jika total skor antara 3 – 4
- 2) *Therapy* (Terapi) : Jika total skor antara 5 – 6

ii. Tokenisme (Sedang)

- 3) *Informing* (Menginformasikan) : Jika total skor antara 7 – 9
- 4) *Consultation* (Konsultasi) : Jika total skor antara 10 – 12
- 5) *Placation* : Jika total skor antara 13 – 15

iii. *Citizen power* (Tinggi)

- 6) *Partnership* (Kemitraan) : Jika total skor antara 16 – 18
- 7) *Delegated Power* (Kekuasaan yang didelegasikan) : Jika total skor antara 19 – 21
- 8) *Citizen Control* (kontrol masyarakat) : 22 – 24

Maka pengukuran tersebut secara lebih mudah akan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengukuran Tingkat Partisipasi

Partisipasi Masyarakat	Tingkatan Partisipasi menurut Arnstein (1969)							
	Non-partisipasi (rendah)		Tokenisme (Sedang)			<i>Citizen Power</i> (tinggi)		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Perencanaan								
Pelaksanaan								
Evaluasi								
Total	3 – 4	5 – 6	7 – 9	10 – 12	13 – 15	16 – 18	19 – 21	22 – 24



# PENDEKATAN LAPANGAN

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data utama. Hasil data menggunakan instrumen kuesioner digunakan untuk melihat efektivitas program ekonomi perguliran, peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan yang terkait dengan program. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat data kuantitatif dalam menginterpretasikan data hasil penelitian.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah (1) walaupun wilayah ini termasuk dalam perkotaan, namun masih memiliki permasalahan kemiskinan yang tinggi, dan (2) Program PNPM Mandiri di wilayah ini telah berjalan dan mendapat apresiasi yang baik dari pemerintahan kota Banten, sehingga wilayah penelitian ini mendapatkan *reward* PPMK (Program Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga) berupa penambahan dana pinjaman modal usaha dari pemerintah pusat karena keberhasilan anggota KSM dalam menjalani program ekonomi perguliran. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2014.

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Periode Tahun 2014

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan proposal skripsi			■	■																				
Kolokium					■																			
Perbaikan proposal						■	■																	
Pengambilan data lapang									■	■	■	■												
Pengolahan dan analisis data										■	■	■	■											
Penulisan draft skripsi																■	■	■	■	■				
Sidang skripsi																					■	■	■	
Perbaikan skripsi																					■	■	■	

### **Teknik Pemilihan Responden dan Informan Penelitian**

Jumlah penduduk di Kelurahan Cipocok Jaya adalah 12 048 jiwa dan memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 2 820. Pada kegiatan ekonomi perguliran membagi masyarakat penerima manfaat ke dalam Kelompok Swadaya (KSM) sejumlah delapan kelompok di masing-masing RT/RW yang dipilih, dengan jumlah anggota KSM penerima manfaat sebanyak 44 orang. Penelitian ini menggunakan unit analisis yang berupa individu anggota KSM. Responden merupakan anggota yang mengikuti kegiatan ekonomi perguliran. Segala informasi dan data penelitian bersumber dari responden dan informan. Responden merupakan pihak yang memberikan informasi mengenai keikutsertaannya dalam kegiatan ekonomi perguliran dan dampak terhadap diri pribadi dan atau rumah tangganya. Informan merupakan seorang narasumber yang menjadi sumber informasi terkait dengan situasi yang ada di lingkungannya.

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada program ekonomi perguliran, anggota tersebut bisa seorang kepala rumah tangga ataupun perwakilan anggota rumah tangga lainnya (ibu, anak, dan lain-lain). Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik Sensus dengan jumlah responden sama dengan jumlah populasi anggota penerima manfaat program ekonomi perguliran, yaitu sebesar 44 orang. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak dibatasi dengan tujuan untuk memperkaya data dan informasi mengenai peranan BKM dalam pelaksanaan program di Kelurahan Cipocok.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data serta hasil pengamatan langsung oleh peneliti, melalui hasil wawancara dengan responden informan dan hasil pengukuran oleh peneliti. Data primer tersebut diperoleh melalui teknik wawancara dengan alat bantu kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti. Perolehan data dari informan dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Selain itu juga peneliti melakukan observasi langsung yang dilakukan untuk memperoleh gambaran keadaan desa dan masyarakat secara langsung serta untuk kebutuhan dokumentasi.

Selain data primer, peneliti mengumpulkan data sekunder untuk mendukung data primer. Data tersebut diperoleh melalui kajian pustaka dan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan kondisi Kelurahan Cipocok Jaya, peta lokasi, profil BKM, Profil Program Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis), serta dokumen tertulis lainnya. Data tersebut dapat diperoleh dari kelurahan, Ketua Koordinator BKM, Konsultan PNPM Mandiri, dan lembaga terkait lainnya, selain itu juga dapat dicari melalui literatur buku, internet, jurnal penelitian, dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga membuat catatan harian selama proses pengumpulan data di lapangan untuk melengkapi kekurangan pada data primer maupun data sekunder. Data tersebut bersifat saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain.

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Hasil data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder diakumulasikan menjadi data kuantitatif yang dapat diolah dengan menggunakan program komputer *SPSS 20 for Windows* dan *Microsoft Office Excel*. Pengolahan data tersebut untuk menguji hubungan antar variabel yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam melihat fakta yang terjadi di lapangan, dengan cara menggunakan analisis *Rank Spearman*, serta dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan perbandingan antara perilaku masyarakat yang mengikuti ekonomi bergulir dengan kenyataan di lapangan. Data kuantitatif dari hasil kuesioner dicatat apa adanya dan dilakukan analisis dengan menginterpretasi data tersebut untuk menarik kesimpulan hasil kuesioner.

Data kualitatif diolah melalui tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga data terorganisir sedemikian rupa untuk dapat langsung menjawab perumusan masalah. Selanjutnya data yang disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, tabel, atau bagan. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, melalui verifikasi data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan ulang hasil penulisan, meninjau ulang pada catatan lapang dan melalui proses revisi dosen pembimbing. Hal tersebut dilakukan peneliti sebelum penarikan kesimpulan akhir.



## KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN

### Kondisi Geografis Kelurahan Cipocok Jaya

Secara geografis, Kelurahan Cipocok berjarak empat kilometer dari Kota Serang, perjalanan tersebut dapat ditempuh dalam waktu minimal 30 menit. Sedangkan jarak antara pusat kota Serang dengan kelurahan Cipocok tersebut adalah empat kilometer, jarak tersebut juga dapat ditempuh minimal dalam 30 menit perjalanan. Kelurahan Cipocok Jaya merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Luasan wilayah Kelurahan Cipocok yaitu 243 Ha dengan batas wilayah sebelah utara merupakan Kelurahan Sumur Pecung, sebelah selatan merupakan Kelurahan Karundang, sebelah timur merupakan Kelurahan Banjarsari, sedangkan di sebelah barat merupakan Kelurahan Cipare. Batas-batas wilayah permukiman penduduk di Kelurahan Cipocok dibagi dalam wilayah RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) masing-masing sebanyak 13 RW dan 45 RT.

Jumlah penduduk dari Kelurahan Cipocok Jaya sebesar 12 970 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3 058 KK. Total jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6 391 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3 579 jiwa. Klasifikasi rentang usia penduduk Kelurahan Cipocok adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Klasifikasi penduduk menurut rentang usia di Kelurahan Cipocok

Klasifikasi Penduduk (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
0 – 4	1 202
5 – 9	950
10 – 14	1 115
15 – 24	2 145
25 – 49	5 391
50 Tahun keatas	2 167

Sumber : Data Monografi Kelurahan Cipocok Jaya 2010

Sebagian besar penduduk Cipocok berpendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 3 720 orang, jumlah lainnya yaitu dari penduduk yang hanya lulusan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 438 orang, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 180 orang, serta lulusan Perguruan Tinggi sejumlah 880 orang.

### Keadaan Ekonomi dan Sosial Kelurahan Cipocok Jaya

#### Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Cipocok sebagian besar bekerja pada sektor informal. Salah satu mata pencaharian yang paling banyak ditekuni penduduk Kelurahan Cipocok adalah sebagai pedagang sejumlah 1 980 orang. Mata pencaharian lainnya seperti petani sebanyak 100 orang, buruh sebanyak 900 orang, serta mata pencaharian di sektor formal yaitu sebagai Pegawai Negeri sebanyak 500 orang, TNI sebanyak 75 orang, dan POLRI sebanyak 150 orang. Kelurahan Cipocok memiliki luasan tanah sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, status tanah seperti

perkebunan memiliki luasan 20 Ha, pada peternakan seluas 1 Ha, lahan untuk pertanian seluas 130 Ha. Lahan yang ada tersebut selain dimanfaatkan untuk mendapatkan nafkah, adapun lahan untuk pemukiman seluas 50 Ha, lahan kuburan seluas 5 Ha, lahan tegal seluas 20 Ha, serta lahan yang belum termanfaatkan lainnya seluas 10 Ha.

Kegiatan ekonomi di Kelurahan Cipocok dapat berjalan akibat adanya prasarana perekonomian yang tersedia di kelurahan ini. Salah satunya adalah prasarana industri makanan sejumlah 79 unit, prasarana toko sejumlah 213 unit, serta prasarana waralaba sebesar 6 unit.

### **Keadaan Sosial**

Keadaan sosial merupakan kondisi masyarakat dalam hal adat istiadat, norma-norma, ataupun aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Cipocok. Adapun suatu interaksi sosial yang dibangun oleh masyarakat melalui suatu kelembagaan yang terdapat di Kelurahan Cipocok.

Masyarakat di Kelurahan Cipocok mayoritas beragama islam, jumlah tersebut mencapai 12 944 orang. Adapun masyarakat yang memeluk agama Kristen Katolik sebesar sebelas orang dan protestan sebesar 15 orang. Di samping jumlah pemeluk agama Islam sebagai mayoritas terdapat beberapa sarana peribadatan untuk masyarakat muslim di Kelurahan Cipocok yang berupa Masjid yang berjumlah 18 buah, Mushola 14 buah, serta Majelis Ta'lim sejumlah 15 buah, namun sarana peribadatan bagi penganut agama lain berada diluar Kelurahan Cipocok. Tokoh masyarakat juga diidentikan sebagai tokoh pemuka agama dengan sebutan Alim Ulama sebanyak enam orang, selain itu lembaga pemerintah, ketua RW maupun ketua RT menjadi simbol sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan ini.

Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat Kelurahan Cipocok merupakan bentuk dari interaksi sosial yang dibangun untuk menciptakan kerukunan antar masyarakat. Terdapat berbagai macam organisasi yang terdapat di Kelurahan Cipocok antara lain, LPM/BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), organisasi olahraga, kesenian, Panti Asuhan/YPAC, organisasi perempuan, serta organisasi pemuda. Kegiatan organisasi tersebut merupakan kelembagaan yang ada di Kelurahan Cipocok yang menciptakan suatu wadah untuk menampung segala aspirasi masyarakat.

### **Profil Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan (BKM) Sejahtera**

Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan suatu organisasi sosial yang terdapat di Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan suatu wadah kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat pada tingkat kelurahan yang anggotanya merupakan tenaga pendamping program yang dipilih melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui proses Pemilu, diharapkan anggota BKM yang merupakan tenaga pendamping dapat berperan secara penuh sebagai perwakilan masyarakat untuk mendampingi masyarakat dalam setiap program PNPM Mandiri.

Pemilihan anggota BKM sebagai tenaga pendamping dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat baik pemerintah, masyarakat maupun kelompok peduli setempat. Pembentukan BKM dilakukan melalui Rembug di Kelurahan dalam dua tahapan yaitu pemilihan anggota BKM tingkat Basis dan pemilihan anggota BKM tingkat Kelurahan yang dilaksanakan setelah pemilihan di tingkat basis. Pemilihan tingkat Basis dilaksanakan mulai dari awal sampai dengan akhir Oktober 2012. Sedangkan di tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 19 bulan November Tahun 2012 dihadiri oleh 53 orang ( 38 laki-laki dan 15 perempuan).

Pelaksanaan Pemilu anggota BKM di tingkat kelurahan untuk pemilihan anggota dan koordinator BKM memiliki mekanisme melalui voting tertutup dengan memilih sembilan anggota BKM melalui perolehan suara terbanyak, dan dari sembilan anggota yang terpilih dipilih kembali untuk menentukan koordinator BKM. Pemilihan umum pada tahap basis dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga), masyarakat memilih wakilnya sebanyak dua orang melalui Pemilu. Tahap selanjutnya adalah tingkat kelurahan, semua orang yang terlibat dalam Pemilu di tingkat ini berhak dipilih dan memilih. Proses Pemilu pada tingkat kelurahan yang terpilih sebanyak sembilan orang anggota BKM. Alasan jumlah anggota tersebut adalah agar anggota BKM memiliki jumlah yang ganjil, sehingga dalam proses penentuan kebijakan diharapkan akan lebih mudah dalam menentukan keputusan. Setelah pemilihan anggota BKM, Pemilu juga dilakukan untuk memilih koordinator BKM sebagai penanggung jawab pimpinan BKM. Menurut koordinator BKM Bapak Yunus, dalam memilih koordinator anggota BKM pemilihan dilakukan melalui sistem kepercayaan.

*“Koordinator diibaratkan dewan pimpinan kolektif, semua harus bisa di-handle... salah satunya saya yang sedang ada banyak waktu”-Pak Yunus (Koordinator BKM Sejahtera)*

Tabel 4 Organisasi BKM Sejahtera Kelurahan Cipocok Jaya

Uraian	Keterangan
Nama BKM	SEJAHTERA
Tanggal Pembentukan	28 Oktober 2009
Tanggal Pengesahan Kembali Nama BKM	19 Novemver 2012
Nama Koordinator	YUNUS
No Telpon	087871713633 087871926678
Alamat BKM	JL. Bhayangkara No.1 Kelurahan Cipocok Jaya
Tanggal Pengesahan BKM (Akta Notaris)	03 November 2009
Tanggal Perubahan Pengurus (Notaris)	28 November 2012
Jumlah anggota BKM	9
Anggota Laki-laki/Perempuan	L=8, P=1

Sumber : Data Monografi Kelurahan Cipocok Jaya 2010

Visi dan Misi BKM SEJAHTERA Kelurahan Cipocok Jaya hasil kesepakatan rembug/musyawah dan pemilihan tenaga pendamping BKM pada tanggal 19 November Tahun 2012 dituangkan dalam Anggaran Dasar BKM sebagai berikut :

Visi: Mampu menumbuh kembangkan kapasitas internal kelembagaan BKM Sejahtera menuju BKM Mandiri dan membangun kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak atau lembaga yang memiliki kesamaan prinsip “Tridaya Program Pronangkis” melalui forum Musbangkel dan Rakorbang, monitoring, serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan sarana prasarana secara swadaya dan gotong-royong.

Misi:

1. Mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan masyarakat di lingkungan Kelurahan Cipocok Jaya, baik dalam pembangunan sarana prasarana, sosial maupun ekonomi.

2. Menjadi mediator dan fasilitator masyarakat dalam menghimpun potensi dan menyalurkan aktivitas, produktivitas dan kreativitas warga kelurahan Cipocok Jaya.
3. Menjadi kontrol sosial terhadap pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Cipocok Jaya – Kota Serang.
4. Mengakses potensi sumber daya yang ada di lingkungan warga kelurahan Cipocok Jaya dan sekitarnya, untuk didayagunakan dan dimanfaatkan dengan optimal bagi seluruh warga kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang.

Tenaga pendamping yang tergabung ke dalam anggota Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Sejahtera Kelurahan Cipocok Jaya memfasilitasi rembug warga dalam kesepakatan dan penetapan perencanaan Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk jangka waktu tiga tahun dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis) untuk jangka waktu satu tahun. Adapun PJM Pronangkis disepakati pada tanggal 20 bulan November Tahun 2012. Pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam PJM Pronangkis dialokasikan sejumlah Rp4 227 150 000 dengan komposisi swadaya sebesar Rp560 000 000 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp3 234 450 000 APBD sebesar Rp187 650 000 dan kontribusi pihak-pihak lain (kelompok peduli) sebesar Rp245 000 000. Selain mempertanggungjawabkan anggaran tersebut kepada masyarakat, tenaga pendamping BKM juga menginformasikan perkembangan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan rutin melalui Lurah Cipocok Jaya dan PJOK Kecamatan. BKM Sejahtera telah melaksanakan rembug warga tahunan dalam rangka pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan amanah PJM Pronangkis kepada masyarakat secara rutin. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) terakhir dalam forum Rembug Warga Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2012.

Seperti halnya yang tertera dalam visi misi dari BKM, tenaga pendamping yang tergabung sebagai anggota BKM dalam program PNPM mandiri khususnya pada program ekonomi perguliran memiliki fungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat penerima manfaat program dalam menyalurkan kegiatan usaha mikro menggunakan dana pinjaman modal usaha, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Selain itu pendamping juga sebagai kontrol sosial bagi kelangsungan program, memantau jalannya aliran dana penerima manfaat program agar sesuai dengan fungsi dan tujuan program ekonomi perguliran.

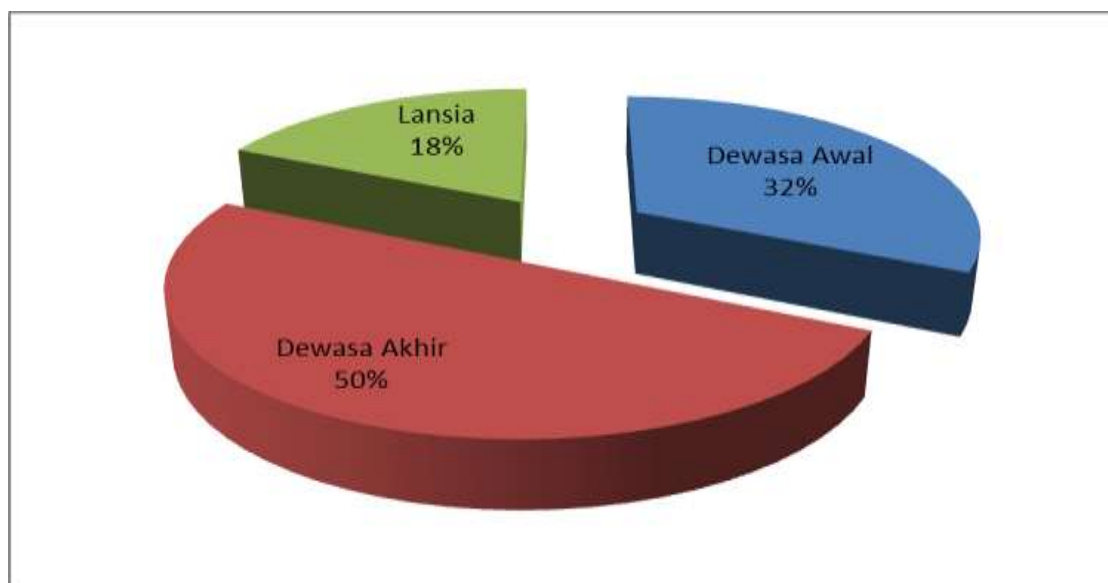


### Karakteristik Responden Penelitian

Penelitian ini mengamati beberapa subyek penelitian untuk mendapatkan segala informasi yang diperlukan dalam penelitian. Subyek penelitian atau dapat disebut dengan responden dari penelitian ini berjumlah 44 orang yang merupakan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemilihan jumlah responden tersebut dilakukan dengan metode sensus yaitu jumlah responden sama dengan jumlah populasi anggota penerima manfaat program ekonomi perguliran. Berikut adalah karakteristik responden dalam penelitian ini.

#### Usia Responden Penelitian

Usia responden adalah selisih antara tahun kelahiran responden dengan tahun 2014 (tahun penelitian). Responden pada penelitian ini memiliki kategori usia yang bervariasi, dari 44 orang yang merupakan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) memiliki klasifikasi umur yang disajikan pada Gambar 3. Diagram pada Gambar 3 menunjukkan kategori usia yang dimiliki anggota KSM pada usia dewasa awal yaitu berada di rentang usia 22 hingga 35 tahun memiliki jumlah 14 orang atau 29.8 persen. Sedangkan persentase anggota KSM pada usia dewasa akhir yaitu sejumlah 22 orang atau sebesar 46.8 persen yang berada pada rentang usia 36 hingga 45 tahun. Jumlah anggota pada kategori usia lansia yaitu dari rentang usia 46-60 sebesar 17 persen atau sebanyak delapan orang.

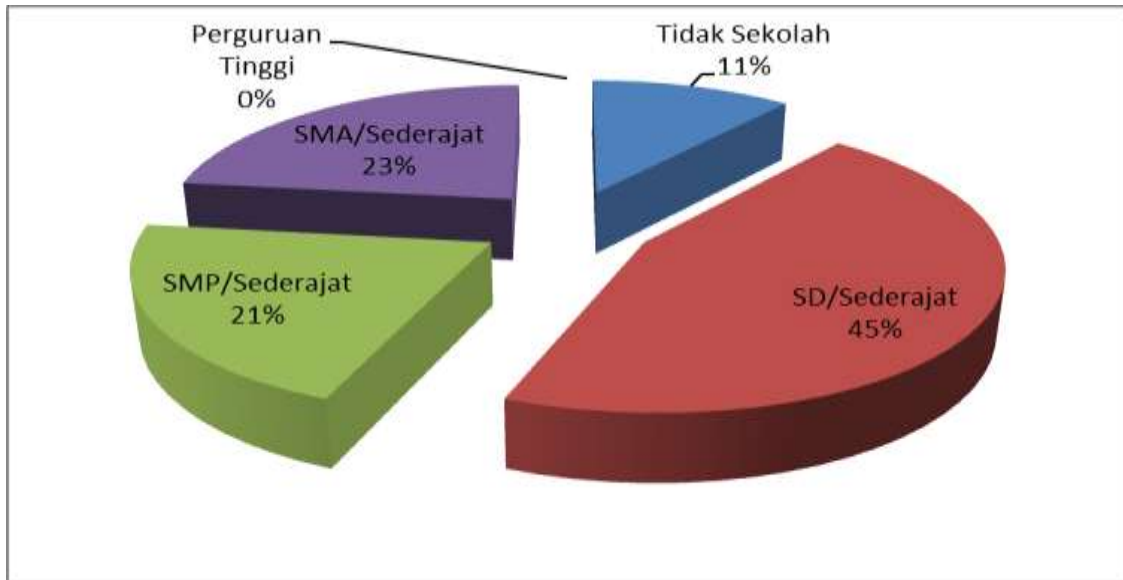


Gambar 3 Persentase usia responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014

#### Pendidikan Responden Penelitian

Pendidikan terakhir responden pada penelitian ini menunjukkan kualitas hidup yang ditunjukkan anggota KSM yang mengikuti program ekonomi perguliran. Wilayah penelitian ini terletak di daerah perkotaan, namun kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya nampaknya masih belum tercapai. Melihat fakta pada penelitian ini, dari hasil data kuesioner mengenai pendidikan terakhir responden, bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini memiliki riwayat pendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 46 persen atau sebanyak 20 orang. Sedangkan pada jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebesar

20 persen atau sebanyak sembilan orang. Persentase jumlah responden pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 23 persen atau sebanyak 10 orang, sedangkan responden yang tidak tamat sekolah atau tidak mengenyam pendidikan memiliki persentase sebesar 11 persen atau sebanyak 5 orang. Persentase distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Persentase pendidikan terakhir responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014

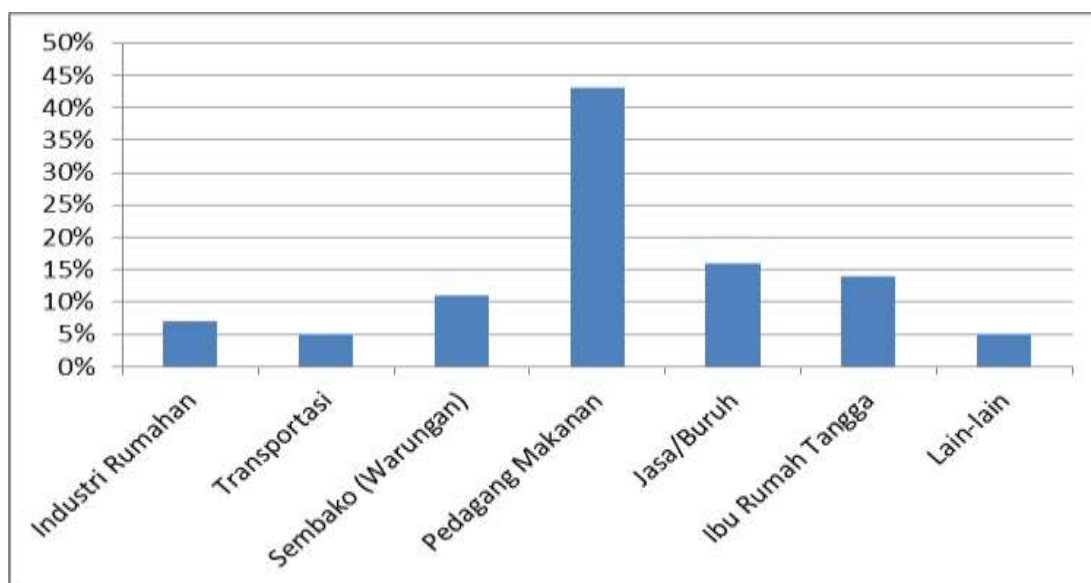
Hasil data pada diagram tersebut menunjukkan bahwa mayoritas anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan responden pada penelitian ini tergolong kategori pendidikan rendah. Hal tersebut ditunjukkan pada persentase tertinggi pendidikan terakhir mayoritas responden berada pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Program pemerintah yang mewajibkan untuk sekolah minimal Sembilan tahun atau hingga jenjang SMP tidak tercapai pada responden penelitian ini. Kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan bagi kualitas hidupnya masih rendah, hanya beberapa yang menyadari bahwa kemiskinan yang dialaminya adalah karena kurangnya pendidikan yang mereka dapatkan semasa muda. Seperti yang dikatakan salah satu responden :

*“...Kebanyakan warga disini kan hanya tamatan SD saja...kami tahu kalau pendidikan kami rendah sehingga banyak orang-orang yang mau memanfaatkan kebodohan kami untuk keuntungan pribadi.”- Pak M (Ketua KSM Melati)*

### Jenis Pekerjaan Responden Penelitian

Penerima manfaat program ekonomi perguliran diwajibkan menggunakan dana pinjaman sebagai modal usaha, baik untuk individu yang telah memiliki usaha ataupun yang membutuhkan modal untuk membangun usaha. Jenis pekerjaan menjadi perhatian khusus bagi BKM untuk menentukan sasaran utama dari program ekonomi perguliran ini. Anggota KSM yang merupakan penerima manfaat dari program ekonomi perguliran memiliki beragam jenis pekerjaan yang digeluti setiap individunya, berikut adalah

diagram yang menunjukkan beragam jenis pekerjaan yang dimiliki anggota KSM Kelurahan Cipocok Jaya :

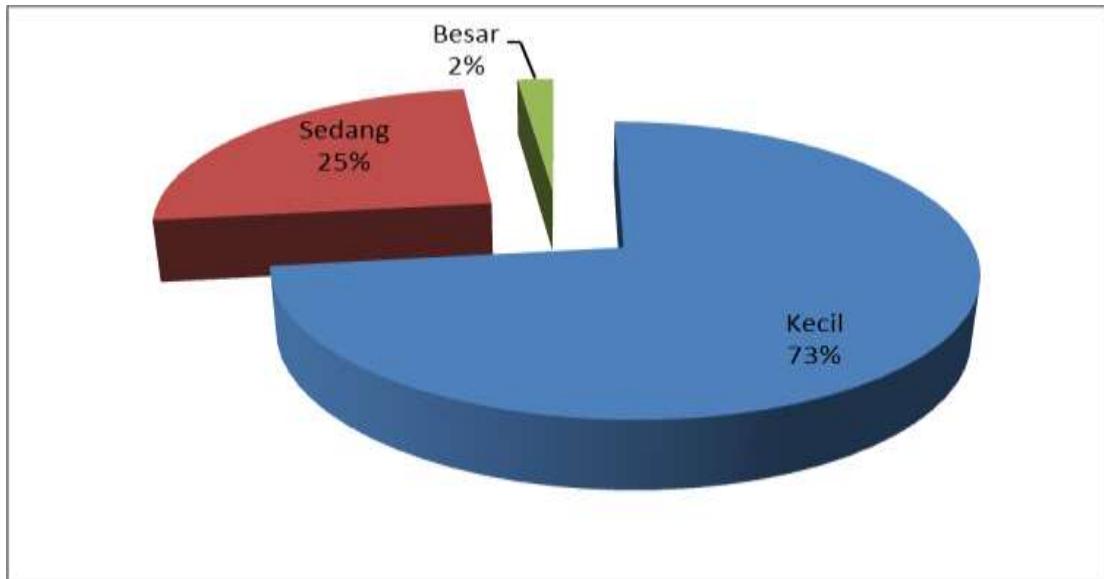


Gambar 5 Persentase jenis pekerjaan responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014

Hasil data pada Gambar 5 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki mata pencaharian sebagai pedagang makanan (penjual gorengan, nasi uduk, aneka kue, dll), sebesar 43.2 persen atau 19 orang responden yang memiliki usaha pada bidang kuliner. Responden yang memiliki usaha industri kecil rumahan sebanyak 6.8 persen, seperti halnya salah satu KSM (KSM anggrek) yang anggotanya mayoritas memiliki pabrik tempe yang beroperasi di rumah masing-masing. Pinjaman modal usaha yang diberikan kepada KSM tersebut sangat membantu mengembangkan usaha khususnya dalam menambah modal bahan baku pembuatan tempe (kacang kedelai). Profesi responden penelitian di bidang transportasi (supir, *ojeg*) sebesar 4.5 persen, pada bidang jasa atau buruh sebesar 15.9 persen dan sebagian besar menggunakan pinjaman modal untuk membuka usaha warung sebagai tambahan penghasilan. Responden yang memiliki usaha menjual bahan sembako atau membuka warung sebesar 11.4 persen. Adapun responden yang pekerjaannya utamanya menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu sebesar 13.6 persen, dengan mengikuti program ini mereka membuka usaha kecil dari hasil pinjaman modal yang diberikan seperti membuka warung, menjual kue/makanan, atau modal untuk *kreditan*. Selain itu sebesar 4.5 persen lainnya bekerja di jenis usaha lain seperti penjual obat hernal dan *kredit*.

### Jumlah Tanggungan Responden Penelitian

Jumlah tanggungan dalam suatu keluarga terdiri dari seseorang yang kehidupannya masih tergantung pada kepala keluarga atau pihak yang telah memiliki penghasilan. Hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner pada anggota KSM di Kelurahan Cipocok Jaya memiliki persentase jumlah tanggungan yang disajikan dalam Gambar 6.



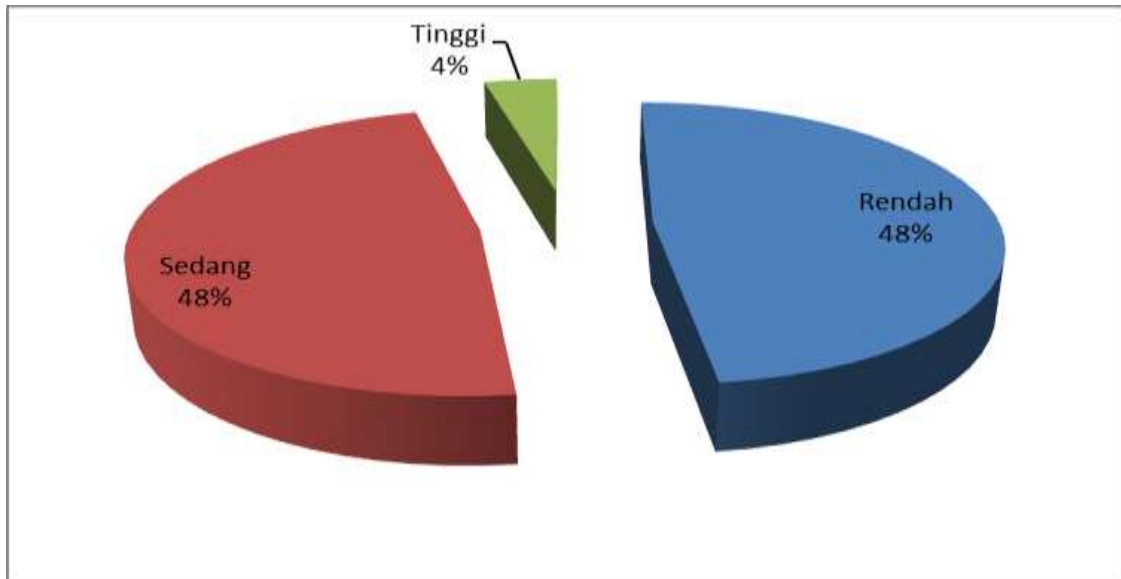
Gambar 6 Persentase jumlah tanggungan responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014

Diagram pada Gambar 6 menunjukkan persentase jumlah tanggungan anggota KSM mayoritas sebesar 73 persen memiliki jumlah tanggungan yang kecil yaitu dari tidak memiliki tanggungan sampai empat orang tanggungan. Persentase jumlah tanggungan pada kategori sedang yaitu berjumlah lima hingga delapan orang sebesar 25 persen. Sedangkan pada kategori jumlah tanggungan yang besar yaitu berkisar antara Sembilan hingga 13 orang, memiliki persentasenya sebesar dua persen atau sebanyak satu orang yang memiliki jumlah tanggungan 13 orang. Jumlah tersebut dimiliki oleh seorang wanita yang berumur 45 tahun yang memiliki beberapa cucu dan anak angkat yang masih ditanggung kehidupannya.

### **Tingkat Pendapatan Responden Penelitian**

Pendapatan responden penelitian ini merupakan jumlah total rupiah yang dihasilkan setiap bulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan terendah berkisar Rp0 dan tertinggi sebesar Rp6 000 000, Rp0 menggambarkan bahwa masih terdapat anggota KSM yang tidak memiliki penghasilan tetap per bulannya. Responden yang tidak berpenghasilan mayoritas adalah ibu rumah tangga. Penelitian ini mengkategorikan pendapatan rata-rata yang didapat hasil wawancara dengan responden ke dalam tiga kategori yaitu pendapatan rendah yaitu kurang dari sama dengan Rp1 000 000, pendapatan sedang yaitu lebih dari Rp1 000 000 hingga Rp 3 000 000 sedangkan kategori pendapatan tinggi yaitu lebih dari Rp3 000 000.

Gambar 7 merupakan persentase hasil dari tabel frekuensi yang disajikan dalam diagram, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendapatan rendah dan sedang memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 48 persen. Responden yang memiliki persentase pendapatan tinggi sebesar empat persen atau sebanyak dua orang. Anggota KSM yang memiliki pendapatan terendah atau Rp0 merupakan anggota KSM yang pernah mengikuti program ekonomi perguliran, namun tidak mampu melanjutkan kembali hingga pinjaman tersebut dihentikan.

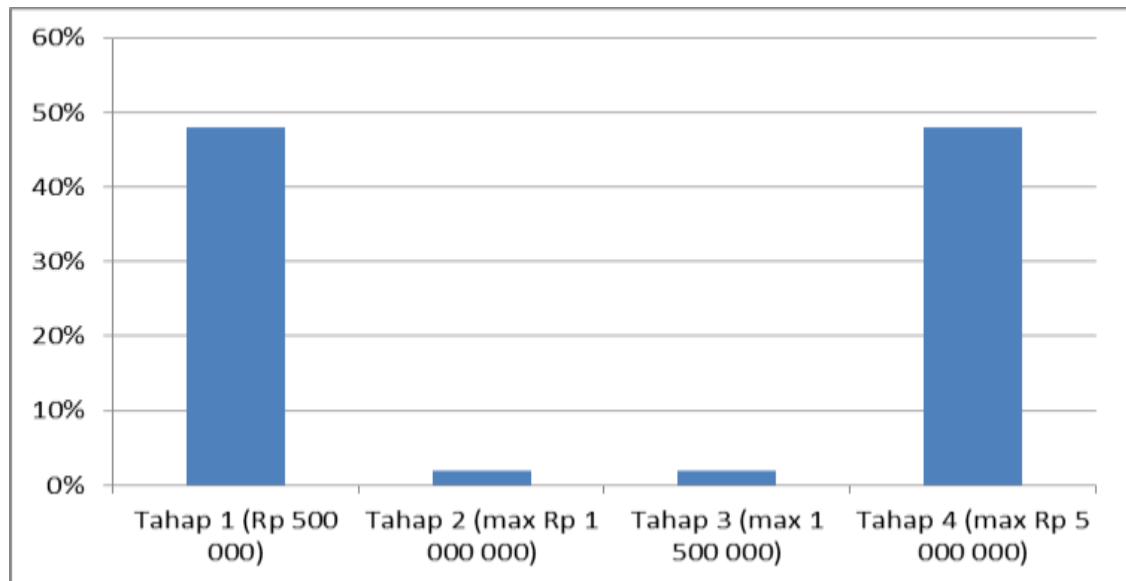


Gambar 7 Persentase tingkat pendapatan responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014

### Jumlah Modal Usaha yang diterima Responden Penelitian

Jumlah dana pinjaman modal usaha yang diberikan kepada anggota KSM pada program ekonomi perguliran terdiri dari 4 tahapan, setiap anggota yang mampu melewati tahapan tersebut dengan tingkat pengembalian 99 persen akan mendapatkan tambahan dana pinjaman yang telah ditentukan. Tahapan awal merupakan dana “pancingan” sebesar Rp500 000, dana tersebut adalah dana awal untuk mendidik penerima manfaat agar digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk modal usaha. Tahap kedua diberikan apabila anggota KSM telah mengembalikan dana pada tahap awal sesuai dengan tempo yang ditentukan. Adapun KSM yang tidak berhasil melakukan perguliran akan dinyatakan telah “Lunas” atau tidak melanjutkan melakukan tahapan pinjaman selanjutnya. Pinjaman tahap kedua diberikan pada 10 bulan berikutnya, jumlah dana pinjaman menjadi maksimal sebesar Rp1 000 000.

Tahap selanjutnya BKM mencairkan dana maksimal sebesar Rp1 500 000 untuk KSM yang masih dapat melanjutkan peminjaman perguliran, dana tersebut diberikan 10 bulan setelah tahap sebelumnya. Apabila anggota KSM tidak mampu menerima kenaikan jumlah pinjaman dikarenakan kesulitan untuk mengembalikannya, anggota diperbolehkan meminta dana sesuai kemampuan pengembalian anggota. Pada tahapan keempat BKM mencairkan dana pinjaman sebesar minimal Rp2 000 000 dan maksimal Rp5 000 000 bagi anggota KSM yang mampu mengembalikan modal dengan lancar. Dana tersebut merupakan suatu *reward* yang diberikan kepada anggota dari pihak PPMK (Program Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga). Jumlah dana tersebut lebih besar daripada jumlah dana yang diterima dari program, anggota KSM dengan tingkat pengembaliannya 99 persen berhak menerima dana PPMK. Berikut adalah persentase jumlah modal usaha yang didapat responden penelitian :

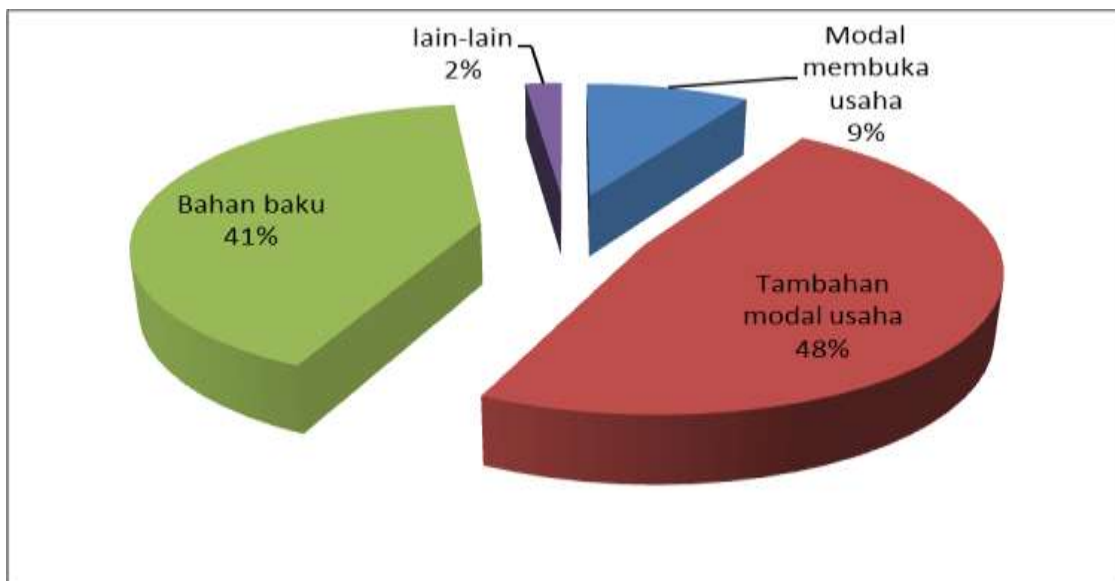


Gambar 8 Persentase jumlah modal usaha yang diterima responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014

Gambar 8 menunjukkan bahwa jumlah responden yang diberikan dana modal usaha pada tahap 1 dan tahap 4 memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 47.7 persen. Anggota KSM pada tahap 1 adalah anggota yang telah “Lunas” atau tidak melanjutkan pinjaman perguliran tersebut, sedangkan pada tahap 4 anggota KSM diberikan sejumlah *reward* dari PPMK maksimal Rp5 000 000 (Rp2 000 000, Rp4 000 000 atau Rp5 000 000). Persentase anggota yang mendapatkan modal usaha pada tahap 2 dan 3 pun memiliki jumlah yang sama yaitu 2.3 persen atau dua orang anggota. Ketidakmampuan dalam mengembalikan dana pinjaman yang cukup besar menjadi alasan mengapa kedua anggota tersebut hanya mampu melakukan pinjaman pada tahap 2 atau 3.

### **Kegunaan Modal Usaha bagi Responden Penelitian**

Anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) diwajibkan menggunakan dana pinjaman modal usaha program ekonomi perguliran untuk membuka usaha atau sekedar menambahkan modal usaha. Pada Gambar 9 menjelaskan bahwa sebesar 48 persen atau 21 anggota KSM menggunakan dana pinjaman modal untuk menambahkan modal usahanya. Sebagian besar anggota sangat tertolong dengan adanya program ini bagi kelangsungan usahanya. Persentase anggota KSM yang menggunakan dana pinjaman modal untuk membeli bahan baku (pabrik tempe, gorengan, aneka kue, dll) adalah sebesar 41 persen atau sebanyak 18 orang, modal tersebut digunakan untuk meningkatkan hasil produksi yang secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan. Adapun anggota KSM yang menggunakan dana tersebut untuk membuka usaha baru, sebagian besar anggota tersebut berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Persentase pada Gambar 9 menunjukkan bahwa anggota yang membuka usaha baru sebesar sembilan persen. Adapun anggota KSM yang menerima dana tersebut namun tidak digunakan dengan semestinya, bukan untuk membuka usaha ataupun menambahkan modal usaha melainkan untuk kepentingan lain yaitu membangun rumah. Walaupun demikian jumlah anggota yang menyelewengkan dana tersebut hanya sejumlah satu orang atau dua persen dari jumlah populasi responden.



Gambar 9 Persentase kegunaan modal usaha bagi responden penelitian di Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten Tahun 2014





## **KEMAMPUAN TENAGA PENDAMPING BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) PNPM MANDIRI**

Peran pendamping merupakan salah satu faktor bagi program pemberdayaan untuk mencapai keberhasilan, seperti halnya dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilaksanakan di Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten. Menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri pendamping diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu pendamping dari luar masyarakat dan pendamping lokal. Pendamping dari luar masyarakat merupakan pendamping yang bukan berasal dari masyarakat, seperti aparat desa dan konsultan PNPM Mandiri.

Pendamping lokal merupakan kader pemberdayaan masyarakat serta seluruh pelaku PNPM Mandiri yang berasal dari masyarakat setempat yang juga berperan sebagai kader pemberdayaan, dalam hal ini pendamping lokal tersebut adalah anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Badan Keswadayaan Mandiri (BKM) sebagai sebuah tim pendamping lokal memiliki fungsi sebagai fasilitator, motivator, narasumber, serta pendidik. Peran pendamping dapat dilihat dari terlaksananya fungsi pendamping penerima manfaat program dalam setiap Program PNPM Mandiri.

### **Kemampuan Memfasilitasi**

Peran tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai fasilitator memiliki kemampuan untuk memfasilitasi masyarakat, peran pendamping sebagai tokoh yang dipercaya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemampuan pendamping dalam memfasilitasi anggota KSM dalam penelitian ini dapat dilihat dari peran pendamping dalam memberikan pelayanan kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengikuti program ekonomi perguliran, memfasilitasi anggota KSM sebagai penampung aspirasi masyarakat, memfasilitasi anggota KSM sebagai pendengar keluhan-kesah masyarakat, memfasilitasi anggota KSM sebagai penghubung komunikasi kepada penyelenggara program, serta memfasilitasi anggota KSM dalam memprioritaskan kebutuhan anggota.

Tabel 5 Jumlah dan persentase kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam memfasilitasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kemampuan Memfasilitasi	Jumlah	
	Orang	%
Sedang	2	4.5
Tinggi	42	95.5
Total	44	100.0

Tabel 5 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan bahwa pendamping memfasilitasi anggota KSM sudah cukup baik. Pendamping termasuk ke dalam kategori yang memiliki kemampuan fasilitasi tinggi dengan jumlah persentase 95.5 persen. Sebagian responden dengan persentase 4.5 persen merasakan bahwa

kemampuan pendamping dalam memfasilitasi di tingkat yang sedang. Hal tersebut menyimpulkan bahwa tenaga pendamping BKM telah memenuhi fungsi pendamping sebagai fasilitator dalam program ekonomi perguliran.

### **Kemampuan Memotivasi**

Pendampingan merupakan proses dimana masyarakat diberikan suatu dorongan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan program pemberdayaan. Tenaga pendamping perlu memiliki fungsi sebagai motivator yang mampu memberikan dorongan kepada masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan program. Penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan tenaga pendamping BKM dalam memotivasi anggota KSM dapat berupa kemampuan pendamping dalam meningkatkan kepercayaan diri anggota KSM, kemampuan pendamping dalam menumbuhkan rasa saling memiliki antar anggota KSM, kemampuan pendamping memberikan dukungan moral kepada anggota KSM, kemampuan pendamping dalam menumbuhkan kesadaran anggota KSM untuk ikut serta dalam program ekonomi perguliran, dan kemampuan pendamping dalam menjalin hubungan baik dengan anggota KSM.

Tabel 6 Jumlah dan persentase kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam memotivasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kemampuan memotivasi	Jumlah	
	Orang	%
Sedang	1	2.3
Tinggi	43	97.7
Total	44	100.0

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kemampuan tenaga pendamping BKM dalam memotivasi anggota KSM memiliki persentase yang tinggi yaitu sebesar 97.7 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa BKM telah berperan sebagai motivator dalam hal meningkatkan kepercayaan diri anggota KSM, menumbuhkan rasa saling memiliki antar anggota KSM, memberikan dukungan moral kepada anggota KSM, menumbuhkan kesadaran anggota KSM untuk ikut serta dalam program ekonomi perguliran, dan menjalin hubungan baik dengan anggota KSM.

### **Kemampuan sebagai Narasumber**

Seorang pendamping dituntut untuk selalu menyampaikan informasi mengenai program, hal tersebut dikarenakan seorang pendamping berperan sebagai narasumber. Tenaga pendamping BKM pada penelitian ini terdiri dari beberapa komponen untuk mengetahui kemampuan pendamping sebagai narasumber, yaitu pendamping sebagai sumber informasi mengenai program-program PNPM Mandiri, pendamping mampu menyampaikan seluruh informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan program kepada anggota KSM, pendamping bersikap transparan terhadap masyarakat mengenai

anggaran dana, pendamping memiliki pengetahuan yang luas terhadap program PNPM Mandiri.

Tabel 7 Jumlah dan persentase kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai narasumber

Kemampuan sebagai Narasumber	Jumlah	
	Orang	%
Sedang	1	2.3
Tinggi	43	97.7
Total	44	100.0

Tabel 7 memperlihatkan bahwa sebagian besar persentase peran pendamping sebagai narasumber berada di kategori tinggi yaitu sebesar 97.7 persen. Sedangkan pada kategori sedang terdapat persentase sebesar 2.3 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan fungsi pendamping BKM yang memiliki kemampuan sebagai narasumber.

### **Kemampuan sebagai Pendidik**

Pendamping program memiliki fungsi sebagai seorang pendidik, dimana pendamping memiliki kemampuan untuk memberikan kebebasan kepada anggota penerima manfaat program untuk mengembangkan kreativitas dalam mengikuti pelaksanaan program. Seorang pendamping adalah panutan bagi masyarakat, maka dari itu sebagai seorang pendamping memerlukan kemampuan untuk mendidik masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan agar saling bekerja sama menumbuhkan kepercayaan diri untuk saling memberdayakan satu sama lain.

Peran sebagai pendidik dalam penelitian ini tentunya harus dimiliki seorang pendamping dalam proses pendampingan pada anggota KSM yang mengikuti program ekonomi perguliran. Peran tersebut berupa kemampuan pendamping dalam mensosialisasikan program PNPM Mandiri kepada masyarakat, kemampuan pendamping mensosialisasikan tata cara peminjaman modal usaha program ekonomi perguliran, pendamping perlu membebaskan anggota KSM berpendapat dalam forum kegiatan program, dan pendamping juga perlu membebaskan kreativitas anggota KSM dalam menggunakan modal usaha program ekonomi perguliran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 100 persen responden menganggap peran pendamping telah memenuhi fungsi sebagai pendidik. Responden yang merupakan anggota KSM program ekonomi perguliran menganggap bahwa tenaga pendamping BKM telah sepenuhnya berperan dalam mendampingi anggota dalam setiap proses program ekonomi perguliran, khususnya dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Pendamping berperan dalam mendidik anggota untuk mentaati aturan yang berlaku melalui sosialisasi tata cara peminjaman modal usaha serta memberikan pengarahan bagaimana mengelola dana tersebut. Hal tersebut yang mendasari anggota sepakat bahwa pendamping memiliki kemampuan yang baik sebagai pendidik anggota KSM dalam pelaksanaan program ekonomi perguliran.



## **EFEKTIVITAS PROGRAM EKONOMI PERGULIRAN**

Program ekonomi perguliran merupakan salah satu kegiatan unggulan dari Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui pinjaman modal usaha kepada anggota KSM yang merupakan penerima manfaat dari program ekonomi perguliran diharapkan mampu mengembangkan bahkan membangun usaha secara mandiri. Penelitian ini menggunakan indikator dalam mengukur efektivitas program. Anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) sebagai penerima manfaat program ekonomi perguliran merupakan penentu dalam mengukur efektivitas program ekonomi perguliran. Pada penelitian ini penulis menjabarkan berbagai komponen untuk mengukur efektivitas program diantaranya yaitu, tingkat keberhasilan program, tingkat kepuasan yang diperoleh, serta intensitas yang dicapai.

### **Tingkat Keberhasilan Program Ekonomi Perguliran**

Keberhasilan program merupakan tolak ukur untuk melihat efektivitas suatu program pemberdayaan, dalam hal ini masyarakat sebagai penerima manfaat program yang merupakan prioritas utama dalam mengukur efektivitas. Penelitian ini mengukur keberhasilan program ekonomi perguliran dengan melihat ketepatan sasaran program dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Kelurahan Cipocok Jaya. Selain itu, keberhasilan program juga dapat terlihat dari tercapainya tujuan program ekonomi perguliran. Seperti yang tertera dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan tujuan dari program ekonomi perguliran adalah menyediakan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Tujuan dari kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri yaitu :

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;
3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir;
4. Menyiapkan kelembagaan sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Indikator tingkat keberhasilan selanjutnya adalah dapat dilihat dari hasil usaha dan pendapatan anggota KSM yang meningkat. Penerima manfaat merasakan peningkatan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas hasil usaha serta jumlah pendapatan yang diterima anggota KSM. Selain itu dana pinjaman modal yang diberikan kepada anggota KSM selaku penerima manfaat harus sesuai ataupun mencukupi kebutuhan dan kondisi penerima manfaat, dengan waktu peminjaman dan pengembalian modal yang sesuai dengan tanggal yang disepakati bersama.

Tabel 8 Jumlah dan persentase tingkat keberhasilan program ekonomi perguliran

Tingkat Keberhasilan	Jumlah	
	Orang	%
Rendah	3	6.8
Sedang	8	18.2
Tinggi	33	75.0
Total	44	100.0

Tabel 8 menunjukkan persentase tingkat keberhasilan Program Ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok Jaya dari hasil penyebaran kuesioner pada delapan KSM yang menjadi kelompok penerima manfaat program tersebut. Responden pada penelitian ini sebagian besar berada pada tingkat keberhasilan program yang tinggi dengan jumlah persentase 75 persen. Sedangkan pada tingkat keberhasilan program sedang persentase sebesar 18.2 persen dan rendah sebesar 6.8 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program ekonomi perguliran di Kelurahan Cipocok sejauh ini berjalan cukup baik.

### Tingkat Kepuasan yang Diperoleh

PNPM Mandiri hadir dalam program kerja untuk melayani, mendampingi, serta mengayomi masyarakat melalui proses pemberdayaan, program-program tersebut diharapkan dapat berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya agar tujuan bersama dapat tercapai yakni dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini melihat efektivitas program ekonomi perguliran dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan yang diperoleh anggota KSM sebagai penerima manfaat program.

Kepuasan yang diperoleh penerima manfaat berupa kepuasan terhadap manfaat yang dihasilkan oleh program ekonomi perguliran, kepuasan terhadap jumlah modal usaha yang diberikan, kepuasan atas kinerja tim pendamping PNPM Mandiri (BKM) dalam melayani masyarakat, kepuasan akan hasil yang telah tercapai berkat adanya program ekonomi perguliran, serta kepuasan terhadap proses dalam mengurus administrasi pengambilan dana pinjaman modal usaha.

Tabel 9 Jumlah dan persentase tingkat kepuasan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terhadap program ekonomi perguliran.

Tingkat Kepuasan	Jumlah	
	Orang	%
Rendah	7	15.9
Sedang	32	72.7
Tinggi	5	11.4
Total	44	100.0

Tabel 9 merupakan persentase kepuasan yang diperoleh anggota KSM sebagai penerima manfaat. Tabel frekuensi tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat kepuasan yang diperoleh anggota KSM sebagian besar pada tingkat sedang yaitu

sebesar 72.4 persen. Sedangkan sebesar 11.4 persen pada tingkat tinggi dan sebesar 15.9 persen pada tingkat rendah.

Persentase tingkat kepuasan anggota KSM pada tingkat sedang menunjukkan bahwa program ekonomi perguliran belum secara maksimal dirasakan berpengaruh secara signifikan dalam berbagai hal, seperti beberapa anggota KSM tidak puas terhadap jumlah modal usaha yang diberikan dikarenakan jumlahnya yang belum dapat mencukupi kebutuhan modal usaha. Sebagian anggota KSM juga tidak puas akan hasil yang telah tercapai dari program ekonomi perguliran, seperti yang dikatakan salah satu responden :

*“...yah ga puas lah neng, namanya juga manusia ga pernah puas hidupnya, kalau cepet puas sama hasil nanti kita ga mau usaha lagi...”-  
Pak S (Ketua KSM Sawo)*

### Intensitas yang Dicapai

Indikator untuk melihat efektivitas suatu program dapat dilihat dari intensitas yang dicapai. Intensitas yang dimaksud merupakan jumlah anggota KSM dalam berkomunikasi (berdiskusi atau mengemukakan pendapat) dengan pendamping (BKM), keaktifan anggota KSM dalam setiap pertemuan/perkumpulan, keterlibatan anggota KSM dalam transparansi anggaran dana, ketepatan anggota KSM dalam pengembalian dana pinjaman, kehadiran anggota KSM dalam pertemuan/perkumpulan, serta intensitas anggot a dalam menggunakan dana pinjaman.

Tabel 10 Jumlah dan persentase intensitas yang dicapai anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam program ekonomi perguliran

Intensitas	Jumlah	
	Orang	%
Sedang	11	25.0
Tinggi	33	75.0
Total	44	100.0

Tabel 10 merupakan persentase intensitas yang dicapai anggota KSM selama mengikuti program ekonomi perguliran. Data tersebut menjelaskan bahwa sebesar 75 persen anggota memiliki intensitas yang tinggi, sedangkan 25 persen memiliki intensitas yang sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa intensitas yang dicapai anggota KSM dalam hal keaktifan anggota dalam berkomunikasi dengan pendamping ataupun dalam hal kehadiran, begitu pula intensitas dalam pengembalian dana pinjaman yang telah tepat pada waktunya. Persentase tersebut telah menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KSM telah mematuhi aturan program ekonomi perguliran.





## **TINGKAT PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**

Proses pemberdayaan menuntut seluruh *stakeholder* terlibat dalam setiap kegiatan dalam program, maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik dari setiap pemegang peranan dalam program tersebut. Sasaran dari program PNPM Mandiri khususnya dalam bidang ekonomi memprioritaskan masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan ataupun mendirikan usaha. Partisipasi penerima manfaat program dalam penelitian ini menggunakan tingkat partisipasi menurut Arnstein, yakni *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power*, dan *citizen control*.

1) *Manipulating* (Manipulasi)

Partisipasi pada tingkatan ini merupakan tingkat terendah responden, karena menandakan adanya keikutsertaan yang dipaksakan atau hanya untuk pemenuhan target kehadiran semata. Dengan kata lain partisipasi pada tingkatan ini adalah semu dan dimanipulasi suatu pihak baik itu penerima manfaat ataupun pihak terkait program.

2) *Therapy* (Terapi)

Tingkat partisipasi terendah kedua adalah *therapy* karena keduanya merupakan partisipasi yang semu. Pada tingkatan ini responden ikut serta melibatkan masyarakat dalam aktivitas program, namun fokus utama dari kebutuhan anggota KSM akan keterlibatannya dalam suatu program belum tercapai.

3) *Informing* (Menginformasikan)

Partisipasi penerima manfaat dalam tingkatan ini ditempatkan pada aliran satu arah. Alasan responden menghadiri kegiatan program dikarenakan ingin mendapatkan informasi semata. Anggota KSM belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan program, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

4) *Consultation* (Konsultasi)

Anggota KSM sebagai peserta kegiatan diberi kesempatan untuk memberi pendapat untuk berkonsultasi kepada pengambil keputusan (BKM, UPK, panitia pelaksana, dll). Pada tahapan ini tidak memberikan jaminan bahwa pengaduan dan ide-ide anggota KSM akan diperhitungkan oleh pemegang keputusan tersebut.

5) *Placation*

Tahapan ini anggota KSM mulai memiliki pengaruh dan dilibatkan dalam memberikan masukan ataupun mengusulkan rencana kepada pihak-pihak terkait program, namun kewenangan untuk menentukannya tetap pada pemegang keputusan.

6) *Partnership* (Kemitraan)

Anggota KSM melakukan negosiasi terhadap pihak terkait program. Terjadi kesepakatan dalam bertanggung jawab terhadap program, dalam setiap kegiatan baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi anggota KSM dan pihak terkait program melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

7) *Delegated Power* (Kekuasaan yang didelegasikan)

Pada tahapan ini anggota KSM melakukan negosiasi dengan pihak terkait program untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Anggota KSM diberikan kekuasaan untuk memegang peranan penting dalam menentukan keputusan dan juga memegang peranan penting dalam menjamin keberlanjutan program ekonomi perguliran.

8) *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Tingkat partisipasi tertinggi adalah kontrol dari anggota KSM untuk mengendalikan setiap kegiatan program. Anggota KSM memiliki tingkat kekuatan untuk mengatur program serta bertanggung jawab penuh atas kebijakan, dan aspek manajerial mengenai anggaran dana pinjaman modal usaha program ekonomi perguliran.

Delapan tingkatan partisipasi di atas merupakan indikator untuk mengukur partisipasi anggota KSM dalam kegiatan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program ekonomi perguliran. Tingkatan tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga skala partisipasi yaitu, non-partisipasi, tokenisme, dan *citizen power*. Skala tersebut juga memiliki nilai rendah, sedang atau tinggi partisipasi anggota KSM dalam program ekonomi perguliran.

### **Perencanaan**

Memulai suatu program pemberdayaan membutuhkan perencanaan yang kuat didalamnya, hal tersebut dimaksudkan untuk menjadikan program lebih terarah dalam pelaksanaannya. Suatu perencanaan hendaknya diputuskan semua pihak yang terlibat dengan program, baik itu pendamping maupun penerima manfaat program. Menurut pedoman umum PNPM Mandiri (Bappenas 2007) perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas mekanisme perencanaan yang diselenggarakan secara berjenjang dari bawah dimana ketiga komponen di atas terlibat secara aktif dalam perencanaan di tingkat desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta dalam perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten/kota.

Pelaksanaan perencanaan program ekonomi perguliran dalam penelitian ini melibatkan penerima manfaat pada kegiatan perencanaan di tingkat kelurahan. Adapun kegiatan tersebut dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui refleksi kemiskinan, identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama. Proses tersebut melibatkan masyarakat sebagai calon penerima manfaat program yang akan membentuk suatu kelompok masyarakat setempat yang berasal dari unsur-unsur organisasi/kelompok di masyarakat, kelompok tersebut dinamakan KSM yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat yang merupakan penerima manfaat program. Pengadaan Musrenbang dilakukan untuk membuat rumusan perencanaan program, rumusan tersebut merupakan informasi dari masyarakat terkait kebijakan untuk pengambilan keputusan di tingkat lebih lanjut.

Partisipasi anggota KSM pada kegiatan perencanaan pada penelitian ini dapat diketahui dari kehadiran anggota pada pertemuan pertama membahas sosialisasi perencanaan program PNPM Mandiri, kehadiran untuk memenuhi kuota undangan, kehadiran untuk mendapatkan informasi, keterlibatan dalam diskusi, pendapat ditanggapi pendamping, negosiasi kepada tenaga pendamping dalam memprioritaskan program yang sesuai kebutuhan anggota KSM, keterlibatan anggota KSM dalam pengambilan keputusan, serta anggota KSM ikut serta memantau proses pembuatan kebijakan program.

Tabel 11 Jumlah dan persentase tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam tahap perencanaan program ekonomi perguliran

Tingkat Partisipasi dalam tahap perencanaan	Jumlah	
	Orang	%
Non Partisipasi	20	45.5
Tokinisme (Partisipasi)	18	40.9
kontrol masyarakat (citizen power)	6	13.6
Total	44	100.0

Tabel 11 menunjukkan bahwa dari 44 responden sebesar 45.5 persen dari jumlah responden berada pada derajat non partisipasi, 40.9 persen berada pada derajat tokenisme (partisipasi), sedangkan 13.6 berada pada derajat kontrol masyarakat (*citizen power*). Hal tersebut merupakan gambaran tingkatan partisipasi anggota KSM dalam keterlibatannya di kegiatan perencanaan program ekonomi perguliran. Kesimpulan dari hasil tabel frekuensi tersebut adalah bahwa sebagian besar anggota KSM berada pada derajat non partisipasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, anggota KSM hanya mengirimkan perwakilan anggota untuk menghadiri Musrenbang di tingkat kelurahan, perwakilan tersebut sebagian besar ketua KSM sehingga informasi yang didapatkan dilanjutkan lagi di masing-masing KSM.

### Pelaksanaan

Pelaksanaan program ekonomi perguliran dilakukan setelah melakukan proses perencanaan program. Kegiatan dalam pelaksanaan ini meliputi pencairan atau pengajuan dana pinjaman modal usaha, penerahan kepada anggota KSM mengenai tata cara serta aturan dalam menggunakan dana perguliran, pengadaan serta pengelolaan jenis usaha masing-masing KSM, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan masing-masing KSM. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh masing-masing KSM yang tersebar di Kelurahan Cipocok Jaya dan difasilitasi oleh tenaga pendamping BKM atau konsultan PNPM Mandiri.

Dana pinjaman modal usaha pada program ekonomi perguliran terdiri dari beberapa tahapan, pada tahapan awal merupakan dana “pancingan” sebesar Rp 500 000 untuk mendidik penerima manfaat agar menggunakan dana tersebut sesuai dengan fungsinya yaitu untuk usaha. Tahap kedua pada 10 bulan berikutnya, jumlah dana pinjaman menjadi sebesar Rp1 000 000. Dana tersebut berhak diberikan kepada KSM yang telah berhasil melakukan pengembalian tepat pada waktunya dan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan sesuai program. Adapun KSM yang tidak berhasil melakukan perguliran akan dinyatakan telah “Lunas” atau tidak melanjutkan melakukan tahapan pinjaman selanjutnya. Tahap selanjutnya BKM mencairkan dana sebesar Rp1 500 000 untuk KSM yang masih dapat melanjutkan peminjaman perguliran, dana tersebut diberikan 10 bulan setelah tahap sebelumnya. Pada setiap tahapan, peran BKM selalu memantau perkembangan pelaksanaan program ekonomi perguliran, mulai dari anggaran dana, kegiatan usaha (individu maupun kelompok), sampai kendala yang dialami oleh anggota KSM/anggota KSM. Pada tahapan keempat tim pendamping mencairkan dana pinjaman sebesar minimal Rp2 000 000 dan maksimal Rp5 000 000 bagi anggota KSM yang melakukan pengembalian modal dengan lancar. Dana tersebut merupakan suatu *reward* yang diberikan kepada anggota KSM dari pihak PPMK

(Program Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga). Jumlah dana tersebut lebih besar daripada jumlah dana yang diterima dari program ekonomi perguliran, anggota KSM dengan tingkat pengembaliannya 99 persen lancar berhak menerima dana PPMK.

Partisipasi anggota KSM pada tahap pelaksanaan program pada penelitian ini dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah, kehadiran anggota pada perkumpulan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), kehadiran anggota pada perkumpulan tersebut hanya untuk mengambil dana modal usaha program ekonomi perguliran, kesesuaian pemberian jumlah dana yang diterima anggota KSM dengan informasi yang disepakati pada kebijakan awal perencanaan program, keterlibatan anggota KSM dalam meminta saran kepada tenaga pendamping BKM dalam menggunakan dana pinjaman tersebut, pendamping memberikan solusi dalam menggunakan dana pinjaman tersebut, anggota KSM ikut serta dalam negosiasi bersama pendamping dalam mengelola anggaran dana tersebut, anggota KSM ikut serta dalam pengambilan keputusan pengelolaan anggaran dana pinjaman modal tersebut.

Tabel 12 Jumlah dan persentase tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pelaksanaan program ekonomi perguliran

Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan	Jumlah	
	Orang	%
Non Partisipasi	18	40.9
Tokenisme (partisipasi)	23	52.3
kontrol masyarakat (citizen power)	3	6.8
Total	44	100.0

Tabel 12 merupakan tingkat partisipasi anggota KSM pada pelaksanaan program ekonomi perguliran. Data tersebut menunjukkan bahwa sebesar 52.3 persen anggota KSM berada pada derajat tokenisme (partisipasi), sedangkan pada derajat non partisipasi sebesar 40.9 persen dan derajat kontrol masyarakat (*citizen power*) sebesar 6.8 persen. Kesimpulan dari hasil tabel frekuensi tersebut adalah bahwa sebagian besar anggota KSM telah berpartisipasi pada level *consultation dan placation* dalam pelaksanaan program. Hal tersebut menunjukkan antusias dari anggota KSM dalam pelaksanaan program ekonomi perguliran khususnya dalam pencairan dana pinjaman, walaupun kehadiran anggota belum sepenuhnya terlibat dalam program. Seperti keterangan salah satu responden :

“...kalau saya mah ikut pas pencairan dana-nya saja, namanya juga butuh duit untuk modal usaha..” – Ibu S (KSM Flamboyan).

Faktor lain juga mempengaruhi persentase derajat non partisipasi yang selisihnya tidak jauh dengan persentase derajat tokenisme. Hal ini disebabkan terdapat anggota yang tidak hadir dikarenakan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan pada hari dimana pencairan dana dilakukan, sehingga sebagian anggota hanya menitipkan dana tersebut kepada ketua untuk diambil di lain waktu.

## Evaluasi

Kegiatan evaluasi program dilaksanakan dalam kurun waktu sekali dalam satu tahun atau disebut dengan Rembug Warga Tahunan (RWT). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Bappenas 2007). Kegiatan evaluasi dihadiri oleh perwakilan masyarakat (termasuk anggota KSM), ketua RT, ketua RW, Pihak Kelurahan, Konsultan PNPM, UPK, hingga tenaga pendamping BKM.

Partisipasi pada kegiatan evaluasi program ekonomi perguliran dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain, kehadiran anggota KSM dalam RWT, kehadiran anggota KSM sebagai perwakilan masyarakat, anggota KSM terlibat dalam transparansi anggaran dana selama periode waktu pelaksanaan program, keterlibatan anggota dalam menyampaikan keluhan selama pelaksanaan program, keterlibatan anggota dalam memberikan saran sebagai bahan evaluasi program, keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan penetapan hasil evaluasi, keterlibatan anggota KSM dalam kesepakatan bersama perihal hasil evaluasi pelaksanaan program ekonomi perguliran, serta keterlibatan anggota KSM dalam mengelola laporan hasil evaluasi pelaksanaan program untuk diserahkan ke tingkat pusat.

Tabel 13 Jumlah dan persentase tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam evaluasi program ekonomi perguliran

Tingkat Partisipasi dalam evaluasi	Jumlah	
	Orang	%
Non partisipasi	35	79.5
Tokenisme (partisipasi)	5	11.4
kontrol masyarakat (citizen power)	4	9.1
Total	44	100.0

Tabel 13 merupakan persentase derajat partisipasi anggota KSM dalam kegiatan evaluasi program ekonomi perguliran. Sebesar 79.5 persen responden berada pada derajat non partisipasi, sedangkan pada derajat tokenisme (partisipasi) memiliki persentase sebesar 11.4 persen dan responden yang mencapai derajat kontrol masyarakat (*citizen control*) sebesar 9.1 persen. Derajat partisipasi anggota KSM dalam kegiatan evaluasi termasuk pada level yang rendah, hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak terkait program belum melibatkan anggota KSM dalam kegiatan evaluasi program. Penyebab dari rendahnya partisipasi pada kegiatan evaluasi adalah kehadiran peserta RWT hanya perwakilan dari masyarakat Kelurahan Cipocok, selain itu menurut keterangan dari tim pendamping BKM dan Konsultan PNPM, kegiatan RWT memerlukan biaya yang tidak sedikit maka dari itu dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing KSM untuk menjadi saksi dalam melakukan evaluasi program.



# **ANALISIS HUBUNGAN KEMAMPUAN TENAGA PENDAMPING BADAN KESWADAYAAN (BKM), TINGKAT PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT (KSM) DAN EFEKTIVITAS PROGRAM EKONOMI PERGULIRAN**

Pembahasan pada bab ini merupakan hasil analisis dari setiap variabel yang ada pada penelitian. Analisis dilakukan pada tiga variabel besar antara lain kemampuan tenaga pendamping BKM, tingkat partisipasi anggota KSM dan efektivitas program ekonomi perguliran. Penelitian ini menganalisis hubungan antara variabel tersebut, sehingga dapat terlihat variabel mana yang saling berhubungan dan yang tidak berhubungan. Pengolahan data untuk analisis ini menggunakan program komputer aplikasi SPSS 20.0 *for Windows* dan *Microsoft Excel* untuk mempermudah dalam mengolah data, jenis uji statistik dalam aplikasi SPSS yang digunakan adalah uji korelasi *Rank Spearman* dengan menguji masing-masing sub dari variabel besar tersebut.

Hasil pengolahan data melalui uji korelasi *Rank Spearman* diinterpretasikan melalui angka korelasi koefisien yang tertera dalam sebuah tabel. Jika angka yang dihasilkan menjauhi batas kritis yaitu pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$  dan taraf sangat nyata  $\alpha = 0.01$  maka angka yang dihasilkan berhubungan didukung dengan tanda bintang (\*) atau (\*\*) yang tertera pada nilai koefisien korelasi yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan.

## **Hubungan Antara Kemampuan Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Dalam Program Ekonomi Perguliran**

Salah satu fungsi dari tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah meningkatkan keikutsertaan anggota KSM untuk terlibat secara aktif dalam program ekonomi perguliran. Proses pendampingan yang dilakukan oleh BKM bertujuan untuk melakukan fungsi mampu memfasilitasi, mampu memotivasi, mampu menjadi narasumber, hingga mampu menjadi pendidik bagi anggota KSM untuk meningkatkan partisipasi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hal tersebut dilakukan agar tujuan program ekonomi perguliran dapat tercapai sesuai dengan kesepakatan bersama. Analisis hubungan kedua variabel tersebut adalah untuk melihat hubungan kemampuan pendamping dengan partisipasi anggota KSM dalam kegiatan program ekonomi perguliran.

Tabel 14 Korelasi *Rank Spearman* kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan tingkat partisipasi anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) dalam program ekonomi perguliran

Kemampuan tenaga Pendamping BKM	Tingkat Partisipasi					
	Perencanaan		Pelaksanaan		Evaluasi	
	Koefisienn	Sig	Koefisien	sig	Koefisien	Sig
Memfasilitasi	0.047	0.762	0.252	0.100	-0.134	0.384
Memotivasi	-0.092	0.553	0.176	0.254	-0.265	0.083
Sebagai Narasumber	-0.092	0.553	0.176	0.254	-0.265	0.083
Sebagai Pendidik	.	.	.	.	.	.

Korelasi pada taraf nyata: apabila sig lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ ; Korelasi pada taraf sangat nyata : apabila sig lebih kecil dari  $\alpha = 0,01$ . Sumber : Uji Korelasi *Rank Spearman*

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji statistik *Rank Spearman* menghasilkan data seperti Tabel 14, pada variabel kemampuan tenaga pendamping BKM terdiri dari sub variabel yaitu kemampuan memfasilitasi, meotivasi, sebagai narasumber, dan sebagai pendidik. Variabel tingkat partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masing-masing sub variabel dari kedua variabel tersebut dianalisis sehingga dapat diketahui korelasi antar dua variabel tersebut. Data di atas masing-masing memiliki sub variabel yang tidak berhubungan satu sama lain, dapat dilihat dari hasil analisis yang mengacu pada jumlah nilai *sig* yang tertera pada masing-masing sub variabel menunjukkan bahwa angka menjauhi batas kritis yaitu  $\alpha = 0,05$ .

Hasil analisis data variabel kemampuan memfasilitasi dengan perencanaan memiliki nilai 0.047 dengan angka sig.(2-tailed) adalah 0.762 menunjukkan bahwa tidak terdapatnya hubungan antar variabel. Hal ini disebabkan angka yang tertera menjauhi batas kritis yaitu  $\alpha = 0,05$ . Maka kemampuan tenaga pendamping BKM dalam memfasilitasi tidak berhubungan dengan partisipasi anggota KSM dalam kegiatan perencanaan program ekonomi perguliran. Terdapat berbagai faktor dari hasil analisis tersebut antara lain, pada tahap perencanaan keikutsertaan anggota KSM menurut data pada Tabel 11 hanya 40.9 persen dan anggota yang tidak menghadiri pertemuan perencanaan jumlahnya lebih besar daripada yang mengikuti pertemuan yaitu sebesar 45.5 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan pendamping dalam memfasilitasi belum mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam tahap perencanaan program. Begitu pula data yang dihasilkan pada kemampuan pendamping memotivasi, sebagai narasumber ataupun sebagai pendidik pada tahap perencanaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan.

Selain itu alasan dari responden mengenai ketidakhadiran dalam pertemuan pada tahap perencanaan dapat dilihat dari pernyataan salah satu responden sebagai berikut :

“...yang ikut rapat bapak (ketua) saja, kan nanti juga hasil rapatnya disampaikan lagi ke anggota KSM yang lainnya...” – Ibu A (istri ketua KSM Sawo)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa partisipasi sebagian anggota KSM (selain ketua) belum mau sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan program ekonomi perguliran. Anggota KSM sudah merasa cukup mendapatkan informasi seputar program dari keterwakilan ketua dan beberapa anggota lain.



Tahap pelaksanaan program ekonomi perguliran yang mengacu pada Tabel 12, partisipasi anggota berada pada derajat tokenisme (partisipasi), dibandingkan pada tahap yang lain tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap ini berada pada tingkat sedang. Kemampuan tenaga pendamping BKM pada tahap ini yaitu memfasilitasi KSM dalam mencairkan dana pinjaman modal kepada anggota, memotivasi anggota KSM dalam memajukan usaha yang ditekuninya dan memberikan kepercayaan diri akan keberhasilan program, memberikan informasi seputar program agar proses pelaksanaan program lebih transparan, serta mendidik anggota KSM untuk belajar mengelola keuangan dalam melakukan usaha. Menurut hasil penelitian ini, melalui sebagian besar responden dari hasil pengambilan data menyatakan bahwa kemampuan tersebut seluruhnya dimiliki oleh pendamping, namun menurut hasil analisis data di atas tidak terdapat hubungan antara kemampuan pendamping dengan tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap pelaksanaan. Faktor yang mempengaruhi hasil analisis tersebut adalah data pada Tabel 12 menunjukkan tingkat partisipasi tahap pelaksanaan yang berada pada derajat tokenisme (partisipasi) hanya berselisih 11.4 persen dengan derajat non partisipasi. Antara hasil data dari perbandingan dua derajat partisipasi tersebut menunjukkan hasil yang cukup berimbang antara derajat tokenisme (partisipasi) dengan non partisipasi. Melihat aspek tersebut, walaupun data menunjukkan tingkat partisipasi berada pada derajat tokenisme (partisipasi), tetapi persentase anggota KSM yang masih berada di derajat non partisipasi hampir sebagian dari populasi responden.

Pada tahap evaluasi program, kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) merupakan kegiatan yang dilakukan pada periode satu tahun sekali, beberapa responden dalam penelitian mengakui bahwa pada saat evaluasi program yang mengikuti RWT adalah perwakilan anggota KSM saja (biasanya ketua KSM). Pada tahap ini juga anggota KSM memiliki peranan yang pasif dalam menentukan keputusan, pada tahap ini pihak BKM yang lebih dominan menyampaikan laporan pelaksanaan program PNPM Mandiri khususnya program ekonomi perguliran selama satu tahun berlangsungnya program. Kemampuan pendamping sebagai narasumber dalam tahap ini lebih dominan, karena tenaga pendamping BKM merupakan sumber informasi perkembangan kegiatan program mulai dari penggunaan anggaran dana hingga laporan perkembangan kegiatan perguliran modal. Ketua KSM yang merupakan keterwakilan anggota KSM dan masyarakat sekaligus kader pemberdayaan juga ikut dilibatkan menjadi saksi dalam RWT tersebut, untuk menyaksikan laporan kegiatan selama satu tahun berlangsungnya program.

Selain hal tersebut di atas, adapun penyebab hasil analisis antara variabel kemampuan pendamping sebagai pendidik dengan variabel tingkat partisipasi tahap perencanaan, tingkat partisipasi tahap pelaksanaan, dan tingkat partisipasi tahap evaluasi tidak memunculkan hasil uji dikarenakan adanya data yang homogen dari variabel kemampuan sebagai pendidik. Hal tersebut mempengaruhi pada saat pengujian data, sehingga data tidak muncul karena data dari variabel tersebut (Variabel x 1.3) tidak memiliki variasi nilai untuk membandingkan dengan variabel tingkat partisipasi. Hasil interpretasi dari analisis data di atas merupakan beberapa faktor penyebab sub variabel kemampuan tenaga pendamping BKM dengan sub variabel tingkat partisipasi anggota KSM menjadi tidak berhubungan. Hal tersebut membuktikan bahwa peran pendamping yang tinggi belum tentu menjadikan anggota KSM memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Walaupun tenaga pendamping telah melaksanakan fungsi dari perannya tersebut, tetapi kesadaran dari dalam diri anggota KSM untuk terlibat secara aktif dalam program masih rendah.

### **Hubungan Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Efektivitas Program Ekonomi Perguliran**

Analisis hubungan tingkat partisipasi anggota KSM dengan efektivitas program ekonomi perguliran untuk melihat keterhubungan antara tingkat partisipasi anggota KSM dengan efektivitas program ekonomi perguliran. Berdasarkan analisis menggunakan uji statistik *Rank Spearman* dihasilkan data dibawah ini :

Tabel 15 Korelasi *Rank Spearman* tingkat partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan efektivitas program ekonomi perguliran

Tingkat Partisipasi Anggota KSM	Efektivitas Program Ekonomi Perguliran					
	Tingkat Keberhasilan Program		Tingkat Kepuasan yang Diperoleh		Intensitas yang dicapai	
	Koefisien	sig	koefisien	sig	Koefisien	Sig
Perencanaan	-0.006	0.969	-0.208	0.176	0.425**	0.004
Pelaksanaan	0.260	0.088	0.288	0.058	0.093	0.548
Evaluasi	-0.224	0.144	-0.272	0.074	0.173	0.260

\*\*Korelasi pada taraf sangat nyata  $\alpha = 0,01$ . Sumber : Uji Korelasi *Rank Spearman*

Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar variabel tingkat partisipasi anggota KSM dengan efektivitas program tidak terdapat hubungan satu sama lain, kecuali pada sub variabel tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dengan sub variabel efektivitas program yaitu intensitas yang dicapai.

Hasil analisis uji statistik *Rank Spearman* menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan tidak terdapat hubungan dengan tingkat keberhasilan dalam efektivitas program. Merujuk Tabel 8 persentase tingkat keberhasilan yang dinyatakan responden mencapai 75 persen, sedangkan pada Tabel 11 menjelaskan tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan berada di derajat non partisipasi. Kedua data tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi anggota KSM dalam tahap perencanaan tidak berkorelasi dengan tingginya keberhasilan program. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang ditemui dalam penelitian ini di antaranya, anggota KSM merasa tidak ada kewajiban untuk terlibat secara penuh dalam tahap perencanaan, karena anggota merasa memiliki perwakilan dari pihak pendamping BKM dan ketua KSM. Sebagian besar anggota KSM merasakan peningkatan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas hasil usaha serta jumlah pendapatan yang diterimanya. Selain itu dana pinjaman modal yang diberikan kepada anggota KSM telah dirasa sesuai ataupun mencukupi kebutuhan usaha, dengan waktu peminjaman dan pengembalian modal yang sesuai dengan tanggal yang disepakati bersama. Keberhasilan program yang dirasakan responden pada penelitian ini tidak berkorelasi dengan partisipasi responden dalam perencanaan program. Keberhasilan tersebut didapat karena faktor lain, di antaranya kemampuan tenaga pendamping BKM dalam mendampingi anggota KSM dan juga kesadaran diri anggota KSM untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan fungsinya.

Kepuasan yang diperoleh anggota KSM dalam program ekonomi perguliran menurut data pada Tabel 7 berada pada tingkat sedang. Partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan tidak memiliki korelasi dengan tingkat kepuasan yang diperoleh, karena kepuasan yang diperoleh anggota merupakan motivasi dalam diri anggota untuk memenuhi kebutuhan usaha agar lebih baik, bukan karena keterlibatan mereka dalam

proses perencanaan program. Maka dari itu hasil analisis data melalui uji *Rank Spearman* pada Tabel 15 menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan dengan tingkat kepuasan anggota KSM dalam efektivitas program ekonomi perguliran.

Variabel tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan yang dihubungkan dengan variabel intensitas yang dicapai dalam efektivitas program memiliki angka *sig* yang bernilai 0.004. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat, karena nilai tersebut kurang dari batas kritis  $\alpha = 0.01$ . Korelasi antar variabel tersebut juga bernilai signifikan, maka terdapat hubungan antara tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan dengan intensitas yang dicapai dalam efektivitas Program ekonomi perguliran. Anggota KSM mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan pada tahapan perencanaan. Faktor lain yang membuat variabel tersebut berhubungan adalah, partisipasi anggota dalam tahap perencanaan berhubungan dengan ketepatan anggota KSM dalam pengembalian dana pinjaman, kehadiran anggota KSM dalam tahap perencanaan walaupun hanya sebatas memenuhi undangan, serta anggota KSM menggunakan dana pinjaman tersebut sesuai dengan tujuan program yaitu untuk modal usaha.

Menurut hasil analisis pada Tabel 12 tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan tidak berkorelasi dengan tiga variabel efektivitas yaitu tingkat keberhasilan program, tingkat kepuasan yang diperoleh, serta intensitas yang dicapai. Hal tersebut mengandung makna bahwa efektivitas suatu program tidak dilihat dari partisipasi pada tahap pelaksanaan, walaupun anggota KSM berada pada derajat tokenisme (partisipasi) tidak mempengaruhi efektivitas suatu program. Partisipasi hampir sebagian besar anggota pada tahap pelaksanaan terlihat pada saat melakukan pencairan dana, namun tindakan selanjutnya dikelola oleh masing-masing individu anggota. Penggunaan dana tersebut dapat dikelola oleh individu masing-masing dan juga untuk membuat produk kreatif bersama kelompok, namun masing-masing KSM kesulitan untuk membagi tugas kelompok sehingga dana tersebut dikelola untuk modal usaha masing-masing anggota. Hal tersebut membuktikan bahwa keberhasilan, kepuasan serta intensitas dari anggota KSM dalam program bukan berdasarkan keikutsertaannya dalam pelaksanaan.

Kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) untuk membahas perkembangan program selama periode satu tahun sangat bermanfaat baik untuk pendamping ataupun masyarakat penerima manfaat program. Kegiatan RWT dihadiri seluruh perwakilan dari masyarakat di kelurahan Cipocok. Hal tersebut yang membuat partisipasi anggota KSM menjadi terbatas, sehingga derajat partisipasi anggota menjadi rendah. Menurut hasil analisis *Rank Spearman*, hal tersebut tidak memiliki korelasi dengan efektivitas program ekonomi perguliran.

### **Hubungan Kemampuan Tenaga Pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Efektivitas Program Ekonomi Perguliran**

Keterlibatan pendamping mengambil peranan penting dalam efektivitas suatu program pemberdayaan, khususnya pendamping lokal yang berasal dari kalangan masyarakat. Pendamping yang berasal dari keswadayaan masyarakat mampu meningkatkan keberhasilan suatu program. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana hubungan kemampuan tenaga pendamping BKM dalam mendukung efektivitas program ekonomi perguliran.

Tabel 16 Korelasi *Rank Spearman* kemampuan tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan tingkat partisipasi anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) dalam program ekonomi perguliran

Kemampuan tenaga pendamping BKM	Tingkat Keberhasilan Program		Tingkat Kepuasan yang Diperoleh		Intensitas yang dicapai	
	koefisien	sig	Koefisien	Sig	koefisien	Sig
Memfasilitasi	0.403**	0.007	0.407**	0.006	0.378*	0.011
Memotivasi	0.238	0.120	0.284	0.061	0.264	0.083
Sebagai Narasumber	0.238	0.120	0.284	0.061	0.264	0.083
Sebagai Pendidik	.	.	.	.	.	.

\*Korelasi pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$ ; \*\*Korelasi pada taraf sangat nyata  $\alpha = 0,01$ . Sumber : Uji Korelasi *Rank Spearman*

Tabel 16 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kemampuan BKM dalam memfasilitasi terhadap tingkat keberhasilan program, tingkat kepuasan, serta intensitas yang dicapai anggota KSM dalam efektivitas program ekonomi perguliran. Nilai *sig* dari masing-masing variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari batas kritis yaitu  $\alpha = 0,05$  atau 0.01. Kemampuan pendamping sebagai fasilitator dapat memberikan peningkatan positif terhadap keberhasilan program, kepuasan hingga intensitas yang dicapai anggota KSM. Hal tersebut dilihat dari kemampuan pendamping dalam memberikan pelayanan kepada anggota KSM, memfasilitasi anggota KSM sebagai penampung aspirasi masyarakat, memfasilitasi anggota KSM sebagai pendengar keluh-kesah masyarakat, memfasilitasi anggota KSM sebagai penghubung komunikasi kepada penyelenggara program, serta memfasilitasi anggota KSM dalam memprioritaskan kebutuhan anggota. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping secara otomatis meningkatkan efektivitas program ekonomi perguliran.

Kemampuan tenaga pendamping BKM sebagai motivator nampaknya tidak berkorelasi dengan efektivitas program ekonomi perguliran, dari hasil analisis didapatkan bahwa nilai *sig* antar variabel melebihi batas kritis sehingga menyebabkan variabel kemampuan pendamping sebagai motivator tidak berhubungan dengan efektivitas program. Faktor yang mempengaruhi hasil analisis tersebut salah satunya adalah anggota KSM belum sepenuhnya termotivasi karena mereka menyadari bahwa motivasi datang dari dalam diri individu masing-masing dan kehadiran pendamping hanya sebagai media untuk menumbuhkan motivasi.

Tenaga pendamping merupakan "penyambung lidah" antara pihak "atas" ke "bawah" dan pihak "bawah" ke "atas", seperti halnya tenaga pendamping BKM

memiliki kemampuan sebagai narasumber bagi anggota KSM mengenai informasi seputar program ekonomi perguliran. Tanggung jawab sebagai seorang pendamping untuk menyampaikan segala informasi penting terkait program kepada anggota KSM, sehingga program dapat berjalan dengan transparan. Hasil uji statistik dengan *Rank Spearman* menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kemampuan pendamping sebagai narasumber dengan efektivitas program. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pihak anggota KSM yang mendapat informasi dari pihak lain selain dari pihak pendamping BKM, karena informasi tidak hanya berasal dari pihak pendamping.

Hasil analisis data melalui uji statistik *Rank Spearman* untuk menguji hubungan variabel kemampuan tenaga pendamping BKM sebagai pendidik dengan efektivitas program tidak muncul dikarenakan adanya data yang homogen dari variabel  $x$  1.3 (Gambar 2) sehingga nilai menjadi tidak bervariasi. Hal tersebut mempengaruhi pada saat pengujian data, sehingga variabel kemampuan pendamping sebagai pendidik tidak memiliki korelasi dengan ketiga variabel efektivitas program yaitu tingkat keberhasilan, tingkat kepuasan dan intensitas. Pendamping yang memiliki kemampuan sebagai pendidik melakukan sosialisasi terhadap kebijakan peraturan yang berlaku dari pelaksana PNPM Mandiri, namun tanpa mempengaruhi peningkatan keberhasilan, kepuasan dan intensitas yang dicapai terhadap program ekonomi perguliran.

### **Ikhtisar**

Hasil analisis untuk mengetahui hubungan peran tenaga pendamping BKM dengan tingkat partisipasi anggota KSM pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil uji statistik *Rank Spearman*. Kesimpulan yang didapat dari data hasil analisis tersebut adalah bahwa kemampuan pendamping memfasilitasi, memotivasi, sebagai narasumber, maupun sebagai pendidik tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Hal tersebut disebabkan oleh data dari variabel tingkat partisipasi memiliki perbandingan selisih yang tidak signifikan, selain itu partisipasi anggota KSM dapat disimpulkan sebagian besar berada pada derajat non partisipasi. Data tersebut menyebabkan tidak adanya keterhubungan antara nilai peran pendamping yang tinggi dengan tingkat partisipasi anggota KSM yang rendah. Faktanya, tenaga pendamping BKM telah diakui kemampuannya dalam memfasilitasi, dalam memotivasi, sebagai narasumber, bahkan sebagai seorang pendidik oleh responden namun tidak menjamin tingkat partisipasi anggota KSM berada pada derajat tokenisme (partisipasi) seutuhnya. Terdapat berbagai faktor untuk menjawab fenomena tersebut diantaranya, kesadaran anggota KSM terhadap program ekonomi perguliran masih rendah, keikutsertaan anggota KSM dalam program hanya memenuhi undangan semata (memenuhi kuota rapat), selain itu anggota KSM masih sangat tergantung pada tim pendamping BKM untuk menyerahkan sepenuhnya mengenai urusan terkait program.

Hasil penelitian dalam menguji hubungan antara variabel tingkat partisipasi anggota KSM dengan efektivitas program ekonomi perguliran menunjukkan terdapat satu variabel yang memiliki hubungan yaitu variabel tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dengan variabel intensitas yang dicapai dalam mendukung efektivitas program. Tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi tidak membuat tingkat keberhasilan, tingkat kepuasan ataupun intensitas menjadi tinggi begitupun sebaliknya. Tingkatan partisipasi anggota KSM mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi masih cenderung terdapat di derajat non

partisipasi dan tokenisme, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota KSM merupakan partisipasi yang semu atau termasuk dalam kategori *manipulation* atau *therapy*. Temuan tersebut diperoleh langsung dari pengakuan sejumlah responden di lapangan, yang menyatakan bahwa keterlibatannya dalam program hanya sebatas kehadiran untuk memenuhi undangan semata. Keberhasilan, kepuasan hingga intensitas yang dicapai anggota muncul dari dalam diri anggota untuk merubah keadaan usahanya menjadi lebih baik, bukan karena partisipasi aktif dalam tahapan tersebut.

Hasil analisis hubungan kemampuan tenaga pendamping BKM dengan efektivitas program ekonomi perguliran menunjukkan terdapat korelasi antara variabel peran pendamping sebagai fasilitator dihubungkan dengan ketiga variabel efektivitas yaitu tingkat keberhasilan program, tingkat kepuasan yang diperoleh dan intensitas yang dicapai anggota KSM terhadap program ekonomi perguliran. Variabel kemampuan pendamping dalam memotivasi, sebagai narasumber dan sebagai pendidik tidak saling berhubungan satu sama lain dengan variabel efektivitas yaitu tingkat keberhasilan, tingkat kepuasan dan intensitas yang dicapai anggota KSM. Pendamping sebagai fasilitator membuktikan bahwa efektivitas program ekonomi perguliran dapat tercapai karena fungsi pendamping memiliki kemampuan dalam memfasilitasi anggota KSM.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Berdasarkan hasil analisis di lapangan dapat disimpulkan bahwa kemampuan tenaga pendamping BKM dalam memfasilitasi, dalam memotivasi, sebagai narasumber dan sebagai pendidik tidak berhubungan dengan tingkat partisipasi anggota KSM pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Mayoritas persentase partisipasi anggota masih berada pada derajat non partisipasi, keterlibatan anggota masih pada tahap *therapy* bahkan masih pada taraf yang semu atau *manipulation*. Kemampuan tenaga pendamping BKM yang tinggi tidak menjamin akan tingginya derajat partisipasi anggota, sehingga variabel tersebut tidak saling berkorelasi.
2. Tingkat partisipasi anggota KSM dalam program ekonomi perguliran tentunya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, pada penelitian ini partisipasi anggota dalam tahap perencanaan memiliki korelasi terhadap intensitas yang dicapai anggota KSM dalam program ekonomi perguliran. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keterlibatan pada tahap perencanaan mendukung ketepatan anggota dalam mengembalikan dana pinjaman sesuai tempo yang ditentukan pada tahap perencanaan. Selain itu intensitas kehadiran anggota KSM dalam tahap perencanaan walaupun hanya sebatas memenuhi undangan menjadikan awal yang positif dalam menerima program ekonomi perguliran..
3. Hasil analisis antara kemampuan tenaga pendamping BKM dengan efektivitas program ekonomi perguliran memiliki hubungan yang kuat antara kemampuan pendamping dalam memfasilitasi dengan ketiga variabel dari efektivitas program yaitu tingkat keberhasilan program, tingkat kepuasan yang diperoleh dan intensitas yang dicapai anggota KSM. Kemampuan pendamping dalam memfasilitasi membuktikan bahwa efektivitas program ekonomi perguliran dapat tercapai karena fungsi tenaga pendamping BKM sebagai fasilitator. Dibandingkan dengan kemampuan pendamping yang lainnya, kemampuan pendamping dalam memfasilitasi dapat mendukung efektivitas program ini. Proses memfasilitasi dengan anggota KSM dalam mendampingi setiap kegiatan program mampu membuat program ekonomi perguliran dinyatakan sebagai program yang cukup berhasil bagi anggota KSM di Kelurahan Cipocok Jaya, didukung dengan kepuasan anggota terhadap kinerja BKM dan intensitas yang dicapai anggota KSM.

### Saran

Berkaitan dengan simpulan yang diperoleh, berikut adalah saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini :

1. Tenaga pendamping Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) perlu meningkatkan kembali kemampuan dalam memfasilitasi, dalam memotivasi, sebagai narasumber, dan sebagai pendidik agar proses pendampingan dapat

berjalan lebih baik lagi. Hasil analisis pendamping pada penelitian ini walaupun memiliki kemampuan yang sudah cukup baik, namun jika dihubungkan dengan partisipasi anggota KSM masih terlihat tenaga pendamping belum mampu sepenuhnya mempersuasi anggota untuk melibatkan diri dalam program. Anggota KSM perlu diberi kepercayaan, diarahkan dan dipantau secara berkala sehingga keberlanjutan anggota dalam menggunakan dana pinjaman modal dapat tetap bergulir.

2. Bagi anggota KSM, perlu meningkatkan kesadaran dalam diri agar lebih terlibat lagi dalam program, sehingga derajat partisipasi dapat mengalami peningkatan menjadi tokenisme bahkan hingga derajat *citizen power*. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk keberlangsungan program agar dapat tetap berjalan kontinu.
3. Bagi pemerintah, perlu adanya pengawasan dari pihak pemerintah dan pemberian berbagai *reward* agar memacu motivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi terhadap program ini. Sehingga keberlanjutan program dapat membuat masyarakat menjadi mandiri atas usahanya sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP. Vol. 35, No. 4., pp. 216-224 page.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. Pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. (Pedum). (internet). (diunduh 12 Februari 2013). Format/Ukuran: PDF/584KB. Dapat diunduh dari: [p3b.bappenas.go.id](http://p3b.bappenas.go.id).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2013. (Berita Statistika). (internet). (dikutip 12 Oktober 2013). No. 47/07/Th. XVI. Dapat diunduh dari : <http://www.bps.go.id>.
- \_\_\_\_\_. 2013. Profil Kemiskinan di Provinsi Banten Maret 2013. (Berita Statistika). (internet). (dikutip 11 Januari 2014). No. 31/07/36/ Th.VII., Dapat diunduh dari : <http://www.bps.go.id>.
- Fitalia AR. 2012. Pengaruh program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. (internet). (dikutip 12 Oktober 2013). Volume 1(1). Dapat diunduh dari: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>.
- Hadi AR, Effendi I, Hasanuddin T. 2013. Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan partisipasi masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. (internet). (dikutip 2 November 2013). Dapat diunduh dari: [unila.ac.id](http://unila.ac.id).
- Hardojo AP. 2008. Mendahulukan si miskin. Yogyakarta (ID): LKiS Yogyakarta. 212 hal.
- [Kemendiknas] Kementerian Pendidikan Nasional 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. pusat bahasa departemen pendidikan nasional (Internet). (dikutip 27 Februari 2014). Dapat diunduh dari: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.
- Mardikanto T. 2010. Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat. Jawa Tengah (ID): Fakultas Pertanian UNS. 398 hal.
- Mubarak Z. 2013. Evaluasi pemberdayaan masyarakat ditinjau dari proses pengembangan kapasitas pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. (Tesis). (Internet). (dikutip 25 Oktober 2013). (UNDIP). Dapat diunduh dari: <http://eprints.undip.ac.id/23734>.
- PNPM Mandiri Pedesaan Provinsi Banten. (Internet). (dikutip 12 Februari 2014). Dapat diunduh dari: <http://www.pnpm-pedesaan.or.id/?page=news&topic=Masyarakat&id=219>.
- Rizna S, Rusli Z. c2013. Efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) (studi kasus simpan pinjam perempuan Tahun 2012. (internet). (dikutip 25 Oktober 2013) Dapat diunduh dari: [repository.unri.ac.id](http://repository.unri.ac.id).
- Saptono A. 2013. Evaluasi program pengentasan kemiskinan (studi kasus pemberdayaan ekonomi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat). Econo Sains (internet). (dikutip 20 September

- 2013). Volume XI (No 2). Dapat diunduh dari: <http://econosains.com/attachments/article/73/03%20Ari%20Saptono.pdf>.
- Setiana L. 2001. Teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Bogor (ID): Ghaila Indonesia. 83 hal.
- Suharto E. 2005. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Bandung (ID): Refika Aditama. 274 hal.
- Sumodiningrat G. 1999. Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Jakarta (ID). Gramedia Pustaka Utama. 334hal.
- \_\_\_\_\_. 2007. Pemberdayaan sosial. Jakarta (ID). Kompas Media Nusantara: 144hal.
- [TK PNPM-M] Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan. [tidak ada tahun]. Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. (PTO). (internet). (diunduh 12 Februari 2013). Format/Ukuran: PDF/3.26KB. Dapat diunduh dari: [www.pnpm-pedesaan.or.id](http://www.pnpm-pedesaan.or.id).
- Wanto. 2013. Dana kemiskinan Banten Capai Rp 154 Miliar. Tempo (internet). (diunduh 20 September 2013). Dapat diunduh dari: <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/25/058524627/Dana-Kemiskinan-Banten-Capai-Rp-154-Miliar>.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Sketsa Kelurahan Cipocok Jaya



### Lampiran 2 Daftar Nama Responden Penelitian

No	Nomer>Nama KSM	Nama Responden
1	KSM 1 Anggrek	Robain
2	KSM 1 Anggrek	Sukiyat
3	KSM 1 Anggrek	Romidah
4	KSM 1 Anggrek	Fatoni
5	KSM 1 Anggrek	Rohimi
6	KSM 2 Gelombang Cinta	Juhri
7	KSM 2 Gelombang Cinta	Basuni
8	KSM 2 Gelombang Cinta	Asnawi
9	KSM 2 Gelombang Cinta	Arsuji
10	KSM 2 Gelombang Cinta	Wardi
11	KSM 3 Flamboyan	Oom
12	KSM 3 Flamboyan	Sarniah
13	KSM 3 Flamboyan	Sani
14	KSM 3 Flamboyan	Fitri
15	KSM 3 Flamboyan	Asih
16	KSM 4 Sawo	Sobari
17	KSM 4 Sawo	Asmariah
18	KSM 4 Sawo	Zainah
19	KSM 4 Sawo	Suhernah
20	KSM 4 Sawo	Nawasih
21	KSM 4 Sawo	Syamsiah
22	KSM 4 Sawo	Nur Saad
23	KSM 4 Sawo	Rodiah
24	KSM 5 Melati	Mustofa
25	KSM 5 Melati	Kasmi
26	KSM 5 Melati	Abudin
27	KSM 5 Melati	Rohmah
28	KSM 5 Melati	Tarmidi
29	KSM 6 Kamboja	Nursiah
30	KSM 6 Kamboja	Titin
31	KSM 6 Kamboja	Napikah
32	KSM 6 Kamboja	Supiah
33	KSM 6 Kamboja	Iwat
34	KSM 6 Kamboja	Suliah
35	KSM 7 Kenanga	Hapsah
36	KSM 7 Kenanga	Sujinah
37	KSM 7 Kenanga	Salihah
38	KSM 7 Kenanga	Halalah
39	KSM 7 Kenanga	Uliyah
40	KSM 8 Sedap Malam	Julaeha
41	KSM 8 Sedap Malam	Syadiyah
42	KSM 8 Sedap Malam	Naimah
43	KSM 8 Sedap Malam	Rohayati
44	KSM 8 Sedap Malam	Mutmainah

### Lampiran 3 Hasil olah data SPSS Rank Spearman 20.0

#### Peran pendamping terhadap efektivitas program

##### 1. Fasilitator terhadap Tingkat Keberhasilan Program

###### Correlations

		Fasilitator	TingkatKeberhasilanProgram
Fasilitator	Correlation Coefficient	1.000	.403**
	Sig. (2-tailed)	.	.007
	N	44	44
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.403**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.007	.
	N	44	44

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

##### 2. Fasilitator terhadap Tingkat Kepuasan yang diperoleh

###### Correlations

		Fasilitator	TingkatKepuasanYangDiperoleh
Fasilitator	Correlation Coefficient	1.000	.407**
	Sig. (2-tailed)	.	.006
	N	44	44
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.407**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.006	.
	N	44	44

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

##### 3. Fasilitator terhadap Intensitas yang di capai

###### Correlations

		Fasilitator	IntensitasYangDicapai
Fasilitator	Correlation Coefficient	1.000	.378*
	Sig. (2-tailed)	.	.011
	N	44	44
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.378*	1.000
	Sig. (2-tailed)	.011	.
	N	44	44

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

##### 4. Motivator terhadap Tingkat Keberhasilan Program

###### Correlations

		Motivator	TingkatKeberhasilanProgram
Motivator	Correlation Coefficient	1.000	.238
	Sig. (2-tailed)	.	.120
	N	44	44
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.238	1.000
	Sig. (2-tailed)	.120	.
	N	44	44

## 5. Motivator terhadap Tingkat Kepuasan yang diperoleh

Correlations			
		Motivator	TingkatKepuasanYangDiperoleh
Motivator	Correlation Coefficient	1.000	.284
	Sig. (2-tailed)	.	.061
	N	44	44
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.284	1.000
	Sig. (2-tailed)	.061	.
	N	44	44

## 6. Motivator terhadap Intensitas yang dicapai

Correlations			
		Motivator	IntensitasYangDicapai
Motivator	Correlation Coefficient	1.000	.264
	Sig. (2-tailed)	.	.083
	N	44	44
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.264	1.000
	Sig. (2-tailed)	.083	.
	N	44	44

## 7. Narasumber terhadap tingkat keberhasilan program

Correlations			
		Narasumber	TingkatKeberhasilanProgram
Narasumber	Correlation Coefficient	1.000	.238
	Sig. (2-tailed)	.	.120
	N	44	44
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.238	1.000
	Sig. (2-tailed)	.120	.
	N	44	44

## 8. Narasumber terhadap Tingkat Kepuasan yang diperoleh

Correlations			
		Narasumber	TingkatKepuasanYangDiperoleh
Narasumber	Correlation Coefficient	1.000	.284
	Sig. (2-tailed)	.	.061
	N	44	44
Spearman's rho	Correlation Coefficient	.284	1.000
	Sig. (2-tailed)	.061	.
	N	44	44

## 9. Narasumber terhadap Intensitas yang dicapai

**Correlations**

		Narasumber	Intensitas yang dicapai
Spearman's rho	Narasumber	1.000	.264
	Correlation Coefficient		.083
	Sig. (2-tailed)	.	
	N	44	44
Intensitas yang dicapai		.264	1.000
	Correlation Coefficient		.083
	Sig. (2-tailed)		.
	N	44	44

## 10. Pendidik terhadap Tingkat Keberhasilan Program

**Correlations**

		Pendidik	Tingkat Keberhasilan Program
Spearman's rho	Pendidik	.	.
	Correlation Coefficient		.083
	Sig. (2-tailed)	.	
	N	44	44
Tingkat Keberhasilan Program		.	1.000
	Correlation Coefficient		.083
	Sig. (2-tailed)	.	.
	N	44	44

## 11. Pendidik terhadap Tingkat Kepuasan

**Correlations**

		Pendidik	Tingkat Kepuasan yang Diperoleh
Spearman's rho	Pendidik	.	.
	Correlation Coefficient		.083
	Sig. (2-tailed)	.	
	N	44	44
Tingkat Kepuasan yang Diperoleh		.	1.000
	Correlation Coefficient		.083
	Sig. (2-tailed)	.	.
	N	44	44

## 12. Pendidik terhadap Intensitas yang dicapai

**Correlations**

		Pendidik	Intensitas yang dicapai
Spearman's rho	Pendidik	.	.
	Correlation Coefficient		.083
	Sig. (2-tailed)	.	
	N	44	44
Intensitas yang dicapai		.	1.000
	Correlation Coefficient		.083
	Sig. (2-tailed)	.	.
	N	44	44

## Peran pendamping terhadap partisipasi

### 1. Fasilitator terhadap Perencanaan

Correlations			Fasilitator	Perencanaan
Spearman's rho	Fasilitator	Correlation Coefficient	1.000	.047
		Sig. (2-tailed)	.	.762
		N	44	44
	Perencanaan	Correlation Coefficient	.047	1.000
		Sig. (2-tailed)	.762	.
		N	44	44

### 2. Fasilitator terhadap Pelaksanaan

Correlations			Fasilitator	Pelaksanaan
Spearman's rho	Fasilitator	Correlation Coefficient	1.000	.252
		Sig. (2-tailed)	.	.100
		N	44	44
	Pelaksanaan	Correlation Coefficient	.252	1.000
		Sig. (2-tailed)	.100	.
		N	44	44

### 3. Fasilitator terhadap Evaluasi

Correlations			Fasilitator	Evaluasi
Spearman's rho	Fasilitator	Correlation Coefficient	1.000	-.134
		Sig. (2-tailed)	.	.384
		N	44	44
	Evaluasi	Correlation Coefficient	-.134	1.000
		Sig. (2-tailed)	.384	.
		N	44	44

### 4. Motivator terhadap Perencanaan

Correlations			Motivator	Perencanaan
Spearman's rho	Motivator	Correlation Coefficient	1.000	-.092
		Sig. (2-tailed)	.	.553
		N	44	44
	Perencanaan	Correlation Coefficient	-.092	1.000
		Sig. (2-tailed)	.553	.
		N	44	44

### 5. Motivator terhadap Pelaksanaan

Correlations			Motivator	Pelaksanaan
Spearman's rho	Motivator	Correlation Coefficient	1.000	.176
		Sig. (2-tailed)	.	.254
		N	44	44
	Pelaksanaan	Correlation Coefficient	.176	1.000
		Sig. (2-tailed)	.254	.
		N	44	44



## 6. Motivator terhadap Evaluasi

**Correlations**

			Motivator	Evaluasi
Spearman's rho	Motivator	Correlation Coefficient	1.000	-.265
		Sig. (2-tailed)	.	.083
		N	44	44
	Evaluasi	Correlation Coefficient	-.265	1.000
		Sig. (2-tailed)	.083	.
		N	44	44

## 7. Narasumber terhadap perencanaan

**Correlations**

			Narasumber	Perencanaan
Spearman's rho	Narasumber	Correlation Coefficient	1.000	-.092
		Sig. (2-tailed)	.	.553
		N	44	44
	Perencanaan	Correlation Coefficient	-.092	1.000
		Sig. (2-tailed)	.553	.
		N	44	44

## 8. Narasumber terhadap Pelaksanaan

**Correlations**

			Narasumber	Pelaksanaan
Spearman's rho	Narasumber	Correlation Coefficient	1.000	.176
		Sig. (2-tailed)	.	.254
		N	44	44
	Pelaksanaan	Correlation Coefficient	.176	1.000
		Sig. (2-tailed)	.254	.
		N	44	44

## 9. Narasumber terhadap Evaluasi

**Correlations**

			Narasumber	Evaluasi
Spearman's rho	Narasumber	Correlation Coefficient	1.000	-.265
		Sig. (2-tailed)	.	.083
		N	44	44
	Evaluasi	Correlation Coefficient	-.265	1.000
		Sig. (2-tailed)	.083	.
		N	44	44

## 10. Pendidik terhadap Perencanaan

**Correlations**

			Pendidik	Perencanaan
Spearman's rho	Pendidik	Correlation Coefficient	.	.
		Sig. (2-tailed)	.	.
		N	44	44
	Perencanaan	Correlation Coefficient	.	1.000
		Sig. (2-tailed)	.	.
		N	44	44

## 11. Pendidik terhadap Pelaksanaan

**Correlations**

			Pendidik	Pelaksanaan
Spearman's rho	Pendidik	Correlation Coefficient	.	.
		Sig. (2-tailed)	.	.
		N	44	44
	Pelaksanaan	Correlation Coefficient	.	1.000
		Sig. (2-tailed)	.	.
		N	44	44

## 12. Pendidik terhadap Evaluasi

**Correlations**

			Pendidik	Evaluasi
Spearman's rho	Pendidik	Correlation Coefficient	.	.
		Sig. (2-tailed)	.	.
		N	44	44
	Evaluasi	Correlation Coefficient	.	1.000
		Sig. (2-tailed)	.	.
		N	44	44

**Tingkat Partisipasi terhadap Efektivitas Program**

## 1. Perencanaan terhadap Tingkat Keberhasilan Program

**Correlations**

			Perencanaan	TingkatKeberhasilanProgram
Spearman's rho	Perencanaan	Correlation Coefficient	1.000	-.006
		Sig. (2-tailed)	.	.969
		N	44	44
	TingkatKeberhasilanProgram	Correlation Coefficient	-.006	1.000
		Sig. (2-tailed)	.969	.
		N	44	44

## 2. Perencanaan terhadap Tingkat Kepuasan yang diperoleh

**Correlations**

			Perencanaan	TingkatKepuasanYangDiperoleh
Spearman's rho	Perencanaan	Correlation Coefficient	1.000	-.208
		Sig. (2-tailed)	.	.176
		N	44	44
	TingkatKepuasanYangDiperoleh	Correlation Coefficient	-.208	1.000
		Sig. (2-tailed)	.176	.
		N	44	44

## 3. Perencanaan terhadap Intensitas yang dicapai

**Correlations**

		Perencanaan	Intensitas yang dicapai
Spearman's rho	Perencanaan	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.425**
		N	.004
Intensitas yang dicapai		Correlation Coefficient	.425**
		Sig. (2-tailed)	1.000
		N	.004
		N	44

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 4. Pelaksanaan terhadap Tingkat Keberhasilan Program

**Correlations**

		Pelaksanaan	Tingkat Keberhasilan Program
Spearman's rho	Pelaksanaan	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.260
		N	.088
Tingkat Keberhasilan Program		Correlation Coefficient	.260
		Sig. (2-tailed)	1.000
		N	.088
		N	44

## 5. Pelaksanaan terhadap Tingkat Kepuasan yang diperoleh

**Correlations**

		Pelaksanaan	Tingkat Kepuasan yang Diperoleh
Spearman's rho	Pelaksanaan	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.288
		N	.058
Tingkat Kepuasan yang Diperoleh		Correlation Coefficient	.288
		Sig. (2-tailed)	1.000
		N	.058
		N	44

## 6. Pelaksanaan terhadap Intensitas yang dicapai

**Correlations**

		Pelaksanaan	Intensitas yang dicapai
Spearman's rho	Pelaksanaan	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.093
		N	.548
Intensitas yang dicapai		Correlation Coefficient	.093
		Sig. (2-tailed)	1.000
		N	.548
		N	44

## 7. Evaluasi terhadap Tingkat Keberhasilan Program

## Correlations

		Evaluasi	TingkatKeberhasilanProgram
Spearman's rho	Evaluasi	1.000	-.224
	Correlation Coefficient		
	Sig. (2-tailed)	.	.144
	N	44	44
TingkatKeberhasilanProgram		-.224	1.000
	Correlation Coefficient		
	Sig. (2-tailed)	.144	.
	N	44	44

## 8. Evaluasi terhadap Tingkat Kepuasan yang diperoleh

## Correlations

		Evaluasi	TingkatKepuasanYangDiperoleh
Spearman's rho	Evaluasi	1.000	-.272
	Correlation Coefficient		
	Sig. (2-tailed)	.	.074
	N	44	44
TingkatKepuasanYangDiperoleh		-.272	1.000
	Correlation Coefficient		
	Sig. (2-tailed)	.074	.
	N	44	44

## 9. Evaluasi terhadap Intensitas yang dicapai

## Correlations

		Evaluasi	IntensitasYangdicapai
Spearman's rho	Evaluasi	1.000	.173
	Correlation Coefficient		
	Sig. (2-tailed)	.	.260
	N	44	44
IntensitasYangdicapai		.173	1.000
	Correlation Coefficient		
	Sig. (2-tailed)	.260	.
	N	44	44

## Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Wawancara Mendalam dengan anggota KSM Angrek KSM Angrek



Wawancara Mendalam dengan anggota KSM Flamboyan dan Gelombang Cinta



Wawancara Mendalam dengan anggota KSM Sawo



Wawancara Mendalam dengan anggota KSM Sedap Malam dan Kenanga



Contoh Produk Kreatif dari Program Ekonomi Perguliran



Dokumentasi dengan Koordinator BKM (Pak Yunus)



## RIWAYAT HIDUP

Anna Nuur Chulafa dilahirkan di Bogor pada Tanggal 30 Juli 1992. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Rakhmat dan Ety Suryati. Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-kanak Shinta pada Tahun 1997-1998, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri Gunung Batu 1 Bogor pada Tahun 1998-2004, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bogor pada Tahun 2004-2007, dan Sekolah Menengah Atas KORNITA Bogor 2007-2010. Penulis melanjutkan pendidikannya pada Tahun 2010 ke Perguruan Tinggi Negeri Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Ujian Talenta Mandiri IPB (UTMI) di Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM).

Selama penulis menimba ilmu di bangku perkuliahan IPB, penulis aktif di organisasi dan kepanitiaan. Penulis sempat mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agria Swara sebagai sopran 2. Penulis pernah menjadi anggota SAMISAENA FEMA IPB pada divisi Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang merupakan kegiatan pendampingan posdaya di Desa Neglasari Bogor. Penulis pernah mengikuti kepanitiaan pada acara Duta Fema 2012 sebagai anggota divisi PDD. Penulis memiliki prestasi di bidang tarik suara dan bergabung dalam *vocal group* JAVANICATION, sebagai pemenang IPB Art Contest 2012 juara 2 dan IPB Art Contest 2013 juara 2.